

**PENGARUH SASARAN PENGANGGARAN, PENGENDALIAN  
AKUNTANSI, DAN PELAPORAN TERHADAP AKUNTABILITAS  
KINERJA INSTANSI PADA DINAS YANG MENANGANI KETAHANAN  
PANGAN KABUPATEN DAN KOTA  
DAN DI PROVINSI JAWA TENGAH**

**SKRIPSI**

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Mencapai Derajat Sarjana S1**

**Program Studi Akuntansi**



**Disusun Oleh :  
Nuhita Nadhila Hidayatillah  
NIM : 31401606503**

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
FAKULTAS EKONOMI PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
SEMARANG**

**2023**

**PENGARUH SASARAN PENGANGGARAN, PENGENDALIAN  
AKUNTANSI, DAN PELAPORAN PADA DINAS YANG MENANGANI  
KETAHANAN PANGAN KABUPATEN DAN KOTA DAN DI PROVINSI  
JAWA TENGAH**

**Disusun Oleh :**

**Nuhita Nadhila Hidayatillah**

**NIM : 31401606503**

Telah disetujui oleh pembimbing dan selanjutnya dapat diajukan ke hadapan sidang  
panitia ujian Proposal Skripsi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi  
Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Semarang, 4 September 2023

Pembimbing

**Dr. Zainal Alim Adiwijaya, SE, Msi.**

**NIK. 211492005**

**PENGARUH SASARAN PENGANGGARAN, PENGENDALIAN  
AKUNTANSI, DAN PELAPORAN PADA DINAS YANG MENANGANI  
KETAHANAN PANGAN KABUPATEN DAN KOTA DAN DI PROVINSI  
JAWA TENGAH**

**Disusun oleh :**

**Nuhita Nadhila Hidayatillah**

**NIM : 31401606503**

Telah dipertahankan di depan penguji

Pada tanggal 07 September 2023

**Susunan Dewan Penguji**

Pembimbing

Penguji 1

**Dr. Zainal Alim Adiwijaya, SE, Msi.**

**NIK. 211492005**

**Provita Wijayanti, SE, M.Si, Ak.CA**

**NIK. 211403012**

Penguji 2

**Hani Werdi Aprivanti, SE, M.Si., Ak. CA.**

**NIK. 211414026**

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan Untuk memperoleh gelar

Sarjana Ekonomi tanggal 07 September 2023

Ketua Program Studi Akuntansi

**Provita Wijayanti, SE.M.Si., Ak. CA.**

**NIK. 211403012**

## HALAMAN PERNYATAAN

Nama : Nuhita Nadhila Hidayatillah  
NIM : 31401606503  
Program Studi : Akuntansi  
Fakultas : Ekonomi  
Universitas : Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul “Pengaruh Sasaran Penganggaran, Pengendalian Akuntansi, dan Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi pada Dinas yang menangani Ketahanan Pangan Kabupaten dan Kota dan di Provinsi Jawa Tengah” merupakan karya peneliti sendiri tidak ada unsur “*Plagiarisme*” dengan cara yang tidak sesuai dengan etika atau tradisi keilmuan. Peneliti ini siap menerima sanksi apabila dikemudian hari ditemukan pelanggaran etika akademik dalam proposal penelitian ini.

Semarang, 7 September 2023

Yang membuat pernyataan



Nuhita Nadhila Hidayatillah

NIM. 31401606503



## PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nuhita Nadhila Hidayatillah

NIM : 31401606503

Program Studi : Akuntansi

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi dengan judul: **“Pengaruh Sasaran Penganggaran, Pengendalian Akuntansi, dan Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi pada Dinas yang menangani Ketahanan Pangan Kabupaten dan Kota dan di Provinsi Jawa Tengah”** dan menyetujui menjadi hak milik Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta. Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila di kemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Fakultas Ekonomi Islam Sultan Agung.

Semarang, 7 September 2023



Nuhita Nadhila Hidayatillah

NIM : 31401606503

### PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nuhita Nadhila Hidayatillah

NIM : 31401606503

Program Studi : Akuntansi

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi dengan judul: **“Pengaruh Sasaran Penganggaran, Pengendalian Akuntansi, dan Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi pada Dinas yang menangani Ketahanan Pangan Kabupaten dan Kota dan di Provinsi Jawa Tengah”** dan menyetujui menjadi hak milik Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta. Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila di kemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Fakultas Ekonomi Islam Sultan Agung.

Semarang, 7 September 2023



Nuhita Nadhila Hidayatillah

NIM : 31401606503

## MOTTO

**Jangan membandingkan kehidupanmu dengan kehidupan orang lain. Tidak ada perbandingan antara matahari dan bulan. Keduanya bersinar saat waktunya tiba**

## PERSEMBAHAN

1. ALLAH SWT yang telah memberikan kemudahan, kelancaran hingga sampai saat ini.
2. Bapak Suhartono
3. Ibu Irmajani
4. Kakak Pradipta Dina Inuparengga
5. Adik Suci Indah Lestari
6. Teman hidup Avip Prasetyo, S.Tr.Pel.

## ABSTRAK

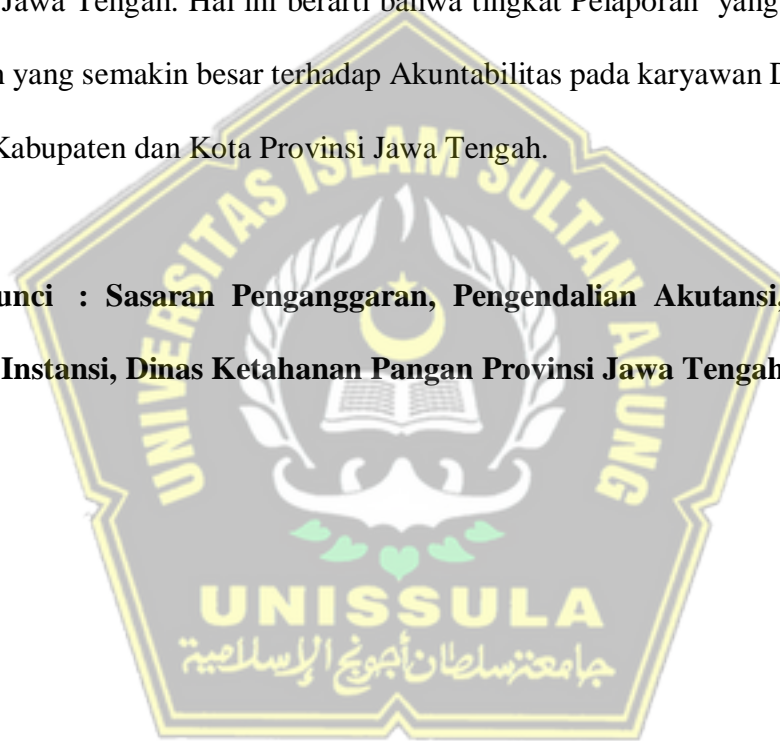
Seluruh instansi pemerintah wajib memahami akuntabilitasnya sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing yang meliputi keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan visi dan misi instansi. Sebagai asas umum, akuntabilitas penyelenggaraan Negara menentukan bahwa setiap kegiatan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemenang kedaulatan tertinggi Negara. Anggaran dibutuhkan oleh sebuah organisasi untuk menerjemahkan keseluruhan strategi kedalam rencana dan tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Anggaran merupakan salah satu elemen penting dalam perencanaan agar dapat

Penelitian ini menganalisis tentang pengaruh sasaran anggaran pengendalian akuntansi dan pelaporan pada Dinas yang menangani Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota dan di Provinsi Jawa Tengah. Populasi yang ada di dalam penelitian ini adalah seluruh kinerja instansi yang berada pada Dinas yang menangani Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota dan di Provinsi Jawa Tengah. Adapun data yang didapat dalam penelitian ini diambil dari 35 kabupaten. Sasaran Penganggaran mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi pada karyawan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Tengah. Hal ini berarti bahwa tingkat Sasaran Penganggaran yang tinggi memiliki pengaruh yang semakin besar terhadap Akuntabilitas pada karyawan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Tengah. Pengendalian Akuntansi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi pada karyawan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten



dan Kota Provinsi Jawa Tengah. Hal ini berarti bahwa tingkat Pengendalian Akutansi yang tinggi memiliki pengaruh yang semakin besar terhadap Akuntabilitas pada karyawan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Tengah. Pelaporan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi pada karyawan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Tengah. Hal ini berarti bahwa tingkat Pelaporan yang tinggi memiliki pengaruh yang semakin besar terhadap Akuntabilitas pada karyawan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Tengah.

**Kata Kunci : Sasaran Penganggaran, Pengendalian Akutansi, Akuntabilitas Kinerja Instansi, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah**



## ABSTRACT

All government agencies are required to understand their accountability according to their respective main tasks and functions, which include success and failure in implementing the agency's vision and mission. As a general principle, accountability in state administration determines that every activity resulting from the end of state administration activities must be accountable to the public as the winner of the highest sovereignty of the state. A budget is needed by an organization to translate the overall strategy into short and long term plans and goals. The budget is one of the important elements in planning so that it can be This research analyzes the influence of budget targets on accounting control and reporting in the Department that handles Regency/City Food Security and in Central Java Province. The population in this research is all the performance of agencies in the Department that handles Regency/City Food Security and in Central Java Province. The data obtained in this research was taken from 35 districts. Budgeting targets have a significant influence on agency performance accountability for employees of the District and City Food Security Services of Central Java Province. This means that a high level of Budgeting Targets has a greater influence on Accountability for employees of the District and City Food Security Services of Central Java Province. Accounting Control has a significant influence on Agency Performance Accountability for employees of the District and City Food Security Services of Central Java Province. This means that a high level of Accounting Control has a greater influence on the accountability of employees of the

District and City Food Security Services of Central Java Province. Reporting has a significant influence on Agency Performance Accountability of employees of the District and City Food Security Services of Central Java Province. This means that a high level of reporting has a greater influence on accountability for employees of the District and City Food Security Services of Central Java Province.

**Keywords: Budgeting Targets, Accounting Control, Agency Performance Accountability, Central Java Province Food Security Service**



## KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang senantiasa telah melimpahkan rahmat, nikmat, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan usulan skripsi dengan judul **“Pengaruh Sasaran Penganggaran, Pengendalian Akuntansi, dan Pelaporan pada Dinas yang Menangani Ketahanan Pangan Kabupaten dan Kota dan Di Provinsi Jawa Tengah”** ini dapat di selesaikan dengan baik yang menjadi salah satu syarat untuk menyelesaikan program Sarjana (S1) program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Dalam penelitian ini skripsi ini penulis tidak dapat terlepas dari dukungan berbagai pihak yang sudah memberikan bantuan, arahan, serta bimbingan yang bermanfaat, dukungan, dan motivasi dari berbagai pihak. Oleh sebab itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Heru Sulistyono, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung.
2. Ibu Provita Wijayanti, S.E., M.Si., Ak., CA selaku ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung.
3. Ibu Hani Werdi Apriyanti, S.E., M.Si., Ak., CA selaku Wakil Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung.
4. Bapak Zaenal Alim Adiwijaya, SE., M.Si., Ak, CA selaku dosen pembimbing yang telah membantu untuk menyelesaikan proposal skripsi ini dengan baik.



5. Seluruh Dosen dan Staf Pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat dan berguna untuk penulis.
6. Seluruh Staf dan Karyawan dan Tata Usaha Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Ayah dan ibundaku orangtua terbaik dalam hidupku yang lautan kasih sayang dan doanya selalu teriring setiap sujudnya, dan setiap doanya mampu membuat aku sampai di titik ini.
8. Kakak saya Pradipta Dina Inuparengga dan Adik saya Suci Indah Lestari yang telah memberikan semangat untuk menyelesaikan penulisan tugas akhir ini.
9. Teman hidup Avip Prasetyo,. S. Tr. Pel yang selalu memberikan dorongan untuk menyelesaikan penulisan tugas akhir ini.

Semarang, 7 September 2023

Nuhita Nadhila Hidayatillah

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
HALAMAN PENGUJIAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH .....	iv
MOTTO Dan Persembahan .....	v
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR.....	xi
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	9

<b>1.4</b>	<b>Manfaat Penelitian</b> .....	9
1.4.1	Manfaat Teoritis .....	9
1.4.2	Manfaat Praktis.....	10
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....		<b>31</b>
<b>2.1</b>	<b>Landasan Teori</b> .....	31
2.1.1	Teori Penganggaran .....	31
2.1.2	Mekanisme Penyusunan APBD .....	35
2.1.3	Teori Pelaporan .....	36
2.1.4	Teori Pengendalian Akuntansi .....	38
2.1.5	Teori Akuntabilitas .....	42
<b>2.2</b>	<b>Variabel Penelitian</b> .....	44
2.2.1	Sasaran Penganggaran .....	44
2.2.2	Pengendalian Akuntansi.....	45
2.2.3	Pelaporan.....	46
2.2.4	Akuntabilitas Kinerja Instansi .....	48
<b>2.3</b>	<b>Penelitian Terdahulu</b> .....	50
<b>2.4</b>	<b>Pengembangan Hipotesis</b> .....	54
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....		<b>58</b>

<b>3.1</b>	<b>Jenis Penelitian</b> .....	58
<b>3.2</b>	<b>Populasi Dan Sampel</b> .....	58
<b>3.3</b>	<b>Jenis dan Sumber Data</b> .....	59
<b>3.4</b>	<b>Metode Pengumpulan Data</b> .....	60
<b>3.5</b>	<b>Definisi Opersional dan Indikator Variabel</b> .....	61
<b>3.6</b>	<b>Teknik Analisis</b> .....	63
3.6.1	Analisis Statistik Deskriptif .....	64
3.6.2	Uji Kualitas Data Diri .....	64
<b>3.7</b>	<b>Pengujian Hipotesis</b> .....	67
3.7.1	Analisis Regresi Linier Berganda.....	67
3.7.2	Uji t .....	68
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....		<b>70</b>
<b>4.1</b>	<b>Hasil Penelitian</b> .....	70
<b>4.2</b>	<b>Karakteristik Responden</b> .....	70
4.2.1	Jenis Kelamin .....	70
4.2.2	Masa Kerja .....	72
4.2.3	Tingkat Pendidikan .....	73
<b>4.3</b>	<b>Analisis Kualitatif</b> .....	74



4.3.1	Analisis Deskriptif Variabel Sasaran Penganggaran .....	75
4.3.2	Analisis Deskriptif Pengendalian Akutansi .....	77
4.3.3	Analisis Deskriptif Variabel Pelaporan .....	79
4.3.4	Analisis Deskriptif Variabel Akuntabilitas Kinerja Instansi.....	81
<b>4.4</b>	<b>Analisis Kuantitatif .....</b>	<b>84</b>
4.4.1	Hasil Uji Validitas .....	84
4.4.2	Hasil Uji Reliabilitas.....	85
4.4.3	Uji Normalitas .....	86
4.4.4	Uji Kolmogorov Smirnov .....	87
4.4.5	Uji Multikolinieritas.....	88
4.4.6	Uji Heteroskedastisitas.....	89
4.4.7	Pengujian Regresi Linier Berganda.....	91
<b>4.5</b>	<b>Uji T.....</b>	<b>94</b>
<b>4.6</b>	<b>Pembahasan.....</b>	<b>95</b>
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>100</b>
<b>5.1</b>	<b>Kesimpulan.....</b>	<b>100</b>
<b>5.2</b>	<b>Saran.....</b>	<b>101</b>
<b>5.3</b>	<b>Keterbatasan Penelitian .....</b>	<b>102</b>
<b>5.4</b>	<b>Agenda Peneliti Mendatang.....</b>	<b>102</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	26
Tabel 3.2. Variabel dan Indikator.....	36



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.2 Model Grafis.....29





**DAFTAR LAMPIRAN**

LAMPIRAN KUESIONER.....48



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Berdasarkan UU Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 mengenai Pembentukan dan Struktur Organisasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, reformasi birokrasi dan peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Dalam upaya agar pemerintahan daerah berjalan secara efektif dan efisien, diperlukan penataan perangkat daerah di lingkungan pemerintahan daerah Provinsi Jawa Tengah yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah, serta prinsip penataan organisasi perangkat daerah yang rasional, proposional, efektif, dan efisien. Hal ini terutama berlaku untuk perangkat daerah di Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah (Harsanti, 2008).

Melalui implementasi Kebijakan Otonomi Daerah berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004 yang telah diubah oleh UU Nomor 23 Tahun 2014, terjadi perubahan paradigma penyelenggaraan pemerintahan daerah dari yang awalnya sentralistis menjadi desentralistis. Hal ini memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk menggali, mengelola, dan mengembangkan potensi daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, kemandirian pemerintah

daerah menjadi suatu keharusan. Untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan masyarakat, partisipasi aktif dari warga daerah, lembaga legislatif, dan eksekutif sangat penting, termasuk dalam upaya membangun daerah mereka serta menikmati hasilnya, yang akhirnya akan menciptakan kebanggaan dan loyalitas terhadap daerah tersebut (Jawadi, 2016).

Selain itu, perubahan paradigma dalam pengelolaan anggaran daerah juga dimaksudkan untuk menciptakan anggaran daerah yang sepenuhnya mencerminkan kebutuhan dan harapan masyarakat setempat terhadap pengelolaan keuangan daerah yang lebih efisien, ekonomis, dan efektif. Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pemerintah harus memastikan akuntabilitas dengan memperhatikan beberapa aspek, termasuk anggaran, pengendalian akuntansi, dan sistem pelaporan. Dalam konteks administrasi pemerintahan, ada pula regulasi seperti Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 yang tanggal 15 Juni 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), yang merupakan salah satu alat untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab. Melalui berbagai regulasi ini, tujuannya adalah untuk memastikan bahwa kinerja pemerintah dapat dipertanggungjawabkan dengan memberikan informasi yang relevan mengenai hasil program yang dilaksanakan kepada perwakilan rakyat dan masyarakat yang ingin menilai kinerja pemerintah.

Konsep akuntabilitas ini mencakup klarifikasi mengenai fungsi, struktur, sistem, dan pertanggungjawaban organisasi atau perusahaan, sehingga pengelolaan perusahaan dapat dilaksanakan secara efektif. Untuk mencapai tingkat akuntabilitas yang diinginkan, pemerintah perlu memperhatikan beberapa aspek, termasuk pengelolaan anggaran, pengendalian akuntansi, pelaksanaan anggaran yang efektif, dan sistem pelaporan (Herawaty, 2011). Anggaran publik sendiri adalah rencana kegiatan yang disusun dalam bentuk rencana pendapatan dan pengeluaran dalam satuan moneter, sehingga anggaran tersebut mencerminkan kebijakan pilihan untuk periode yang akan datang.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 menjelaskan bahwa perencanaan kerja dan anggaran disusun berdasarkan sasaran kerja yang hendak dicapai. Sasaran prestasi kerja ini dijelaskan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP). Akuntabilitas kinerja merujuk pada tanggung jawab suatu lembaga pemerintah untuk mempertanggungjawabkan kesuksesan atau kegagalan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan oleh para pemangku kepentingan, dengan cara mengukur pencapaian organisasi melalui sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan. Laporan kinerja instansi ini disusun secara berkala (Jawadi, 2016).

Setiap lembaga pemerintah memiliki kewajiban untuk memahami akuntabilitasnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang meliputi pencapaian visi dan misi instansi, baik dalam hal keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan. Sebagai prinsip umum, akuntabilitas dalam penyelenggaraan negara

menegaskan bahwa setiap hasil akhir dari kegiatan pemerintahan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, yang merupakan pemegang kedaulatan tertinggi negara. Anggaran menjadi instrumen penting dalam organisasi untuk menerjemahkan strategi keseluruhan menjadi rencana dan tujuan jangka pendek dan panjang. Anggaran juga berperan kunci dalam mengendalikan pencapaian tujuan organisasi. Kejelasan sasaran anggaran mengacu pada sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan dengan jelas dan spesifik, sehingga orang yang bertanggung jawab atas pencapaian sasaran anggaran dapat memahaminya dengan baik. Dengan sasaran anggaran yang jelas, memudahkan dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan yang telah ditetapkan oleh organisasi sebelumnya.

Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas publik, pemerintah daerah, sebagai pengelola dana publik, harus memiliki kemampuan untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan dengan akurat, relevan, tepat waktu, konsisten, dan dapat dipercaya. Laporan keuangan yang harus disusun mencakup laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), neraca, laporan arus kas, dan catatan laporan keuangan yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan daerah, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Pemerintah daerah diharapkan memiliki sistem informasi yang handal. Apabila sistem informasi akuntansi yang dimiliki oleh pemerintah daerah masih kurang kuat, maka kualitas informasi yang dihasilkan

oleh sistem tersebut dapat menyesatkan bagi pihak-pihak yang memiliki kepentingan, terutama dalam proses pengambilan keputusan (Fatmala, 2014).

Sistem pengendalian yang menggunakan informasi akuntansi disebut sebagai pengendalian yang berbasis akuntansi atau sistem pengendalian akuntansi. Sistem pengendalian akuntansi mencakup semua prosedur dan sistem formal yang menggunakan informasi untuk mengawasi atau mengatur aktivitas organisasi. Ini termasuk sistem pelaporan, pelaporan, dan prosedur pemantauan yang bergantung pada informasi. Adanya sistem pelaporan yang efisien sangat penting untuk memantau dan mengendalikan kinerja manajer atau pimpinan dalam melaksanakan anggaran yang telah ditetapkan.

Pemerintah memiliki kewajiban untuk menyediakan informasi keuangan dan informasi lainnya yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik oleh berbagai pihak yang memiliki kepentingan. Penyelenggaraan otonomi daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan yang luas, jelas, dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional. Hal ini diwujudkan melalui pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang diawasi, serta melalui perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Dalam praktiknya, anggaran adalah perincian rencana yang secara resmi dinyatakan dalam bentuk kuantitatif untuk menunjukkan bagaimana sumber daya akan diperoleh dan digunakan selama periode tertentu, biasanya satu tahun (Supriyono, 2002). Proses penyusunan rencana anggaran disebut sebagai



penganggaran, sementara penggunaan anggaran sebagai alat pengendalian aktivitas suatu organisasi disebut sebagai pengendalian anggaran atau pengendalian melalui anggaran. Anggaran merupakan perencanaan kerja yang dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, diukur dengan menggunakan mata uang standar dan unit ukuran lainnya, dan mencakup periode waktu biasanya selama satu tahun. Anggaran adalah suatu rencana kerja jangka pendek yang disusun berdasarkan rencana kegiatan jangka panjang yang telah ditetapkan dalam proses penyusunan program.

Tujuan pelaksanaan otonomi daerah dalam era reformasi saat ini lebih menekankan prinsip-prinsip demokrasi, partisipasi masyarakat, pemerataan, keadilan, serta memperhatikan potensi dan keragaman daerah. Salah satu aspek penting dalam pemerintahan daerah yang perlu diatur dengan cermat adalah pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah. Anggaran daerah memiliki peran yang krusial dalam mendukung siklus perencanaan strategis daerah. Pengelolaan keuangan daerah memerlukan pengawasan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan dana untuk penyelenggaraan pemerintahan. Pengawasan yang efektif diharapkan dapat memastikan distribusi dana yang adil di semua sektor publik sehingga penggunaan keuangan daerah sesuai dengan tujuannya. Adanya pengawasan dalam pengelolaan keuangan pemerintah dapat mencegah terjadinya penyimpangan dalam penggunaan anggaran. Dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) di lingkungan pemerintahan daerah, pemerintah perlu melakukan reformasi dalam semua aspek pengelolaan keuangan daerah. Salah satu langkah yang harus diambil oleh

pemerintah daerah adalah melakukan audit baik secara internal maupun eksternal dalam pelaksanaan pemerintahan.

Terkait dengan sistem pengendalian internal pemerintah, permasalahan utama melibatkan penyimpangan terhadap peraturan-peraturan pendapatan dan belanja, suboptimalnya pelaksanaan prosedur operasional standar (SOP), kurangnya penyusunan SOP atau ketidakkelengkapan SOP, dan masalah lainnya yang berhubungan dengan kelemahan. Masalah lain dalam pengendalian internal terkait dengan pengelolaan pendapatan daerah termasuk kebijakan yang berdampak pada hilangnya potensi penerimaan, SOP yang belum disusun atau tidak lengkap, ketidaksesuaian mekanisme pengelolaan penerimaan daerah dengan ketentuan yang berlaku, dan kelemahan lainnya yang berkaitan dengan Sistem Pengendalian Intern (SPI). Dalam hal pengelolaan aset daerah, masalah mencakup pencatatan yang belum dilakukan atau tidak akurat, kebijakan yang mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan, kurangnya pengelolaan fisik aset yang efektif, dan masalah lainnya.

Pendekatan dalam pengelolaan dan pengawasan keuangan negara, yang sebelumnya cenderung bersifat represif, telah bergeser menjadi bersifat preventif. Terbitnya peraturan hukum mengenai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dapat dianggap sebagai titik perubahan yang mendorong setiap lembaga pemerintah untuk segera mengembangkan sistem pengendalian yang dapat mencegah kemungkinan terjadinya penyimpangan keuangan negara. Pengendalian dan pengawasan terhadap penggunaan keuangan daerah dilakukan oleh auditor

pemerintah yang terdiri dari Inspektorat Jenderal Departemen, Satuan Pengawas Intern (SPI) di berbagai lembaga negara dan perusahaan milik negara (BUMN/BUMD), Inspektorat Wilayah Provinsi (Itwilprop), Inspektorat Wilayah Kabupaten/Kota (Itwilkab/itwilkot), Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Mereka merupakan lembaga pemeriksa eksternal yang bersifat independen.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti mengambil penelitian yang berjudul **“PENGARUH SASARAN PENGANGGARAN, PENGENDALIAN AKUNTANSI, DAN PELAPORAN PADA DINAS YANG MENANGANI KETAHANAN PANGAN KABUPATEN/KOTA DAN DI PROVINSI JAWA TENGAH”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dari latar belakang tersebut, maka peneliti merumuskan penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaruh sasaran penganggaran terhadap akuntabilitas kinerja instansi pada Dinas yang menangani Ketahanan Pangan Kabupaten dan Kota dan di Provinsi Jawa Tengah?
2. Bagaimanakah pengaruh pengendalian akuntansi terhadap akuntabilitas kinerja instansi pada Dinas yang menangani Ketahanan Pangan Kabupaten dan Kota dan di Provinsi Jawa Tengah?

3. Bagaimanakah pengaruh pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pada Dinas yang menangani Ketahanan Pangan Kabupaten dan Kota dan di Provinsi Jawa Tengah?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Untuk dapat melaksanakan penelitian ini dengan baik dan sesuai sasaran, maka peneliti ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh sasaran penganggaran terhadap akuntabilitas kinerja instansi pada Dinas yang menangani Ketahanan Pangan Kabupaten dan Kota dan di Provinsi Jawa Tengah?
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh pengendalian akuntansi terhadap akuntabilitas kinerja instansi pada Dinas yang menangani Ketahanan Pangan Kabupaten dan Kota dan di Provinsi Jawa Tengah?
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pada Dinas yang menangani Ketahanan Pangan Kabupaten dan Kota dan di Provinsi Jawa Tengah?

### **1.4 Manfaat Penelitian**

#### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini dapat berfungsi sebagai acuan dalam pengembangan Ilmu Ekonomi, terutama dalam bidang Akuntansi, terkait dengan tujuan penganggaran, pengendalian akuntansi, dan pelaporan di Dinas yang

bertanggung jawab atas Ketahanan Pangan di berbagai Kabupaten/Kota serta di tingkat Provinsi Jawa Tengah.

## **1.4.2 Manfaat Praktis**

### **1.4.2.1 Bagi Program Studi**

Manfaat penelitian bagi program studi Akuntansi adalah sebagai referensi pengembangan kinerja instansi mengenai pengaruh sasaran penganggaran pengendalian akuntansi dan pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah.

### **1.4.2.2 Bagi Masyarakat**

Untuk mengetahui akuntabilitas kinerja instansi khususnya di Provinsi Jawa Tengah agar masyarakat mengetahui bagaimana kinerja instansi dengan baik.

### **1.4.2.3 Bagi Peneliti**

Dalam rangka memperoleh identitas sebagai seorang akademisi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Tridarma Perguruan Tinggi, yaitu sebagai seorang peneliti yang berkontribusi positif terhadap kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Ilmu Ekonomi Akuntansi.

#### **1.4.2.4 Bagi Dinas Ketahanan Pangan pada Kabupaten dan Kota dan di Provinsi Jawa Tengah**

Kinerja instansi untuk menganalisis terhadap faktor yang mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi melalui sasaran penganggaran pengendalian akuntansi dan pelaporan.





## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Teori Penganggaran**

Anggaran merupakan salah satu alat yang memiliki peran krusial dalam struktur organisasi instansi pemerintah. Dalam konteks penganggaran di instansi pemerintah, partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan anggaran dianggap penting agar aspirasi dan kebutuhan publik dapat menjadi pertimbangan dalam perencanaan anggaran. Proses penganggaran dalam organisasi instansi pemerintah juga memiliki dimensi politik.

Sedangkan, dalam instansi swasta, anggaran biasanya merupakan bagian dari kerahasiaan perusahaan yang tidak diungkapkan kepada pihak pemerintah. Berbeda dengan instansi pemerintah, di mana anggaran diungkapkan kepada pemerintah dengan tujuan untuk mendapatkan kritik, diskusi, dan masukan. Ada beberapa alasan mengapa ini penting bagi pemerintah, termasuk karena anggaran digunakan sebagai alat untuk mengarahkan perkembangan sosial-ekonomi, menjamin kontinuitas, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Untuk mencapai tujuan yang diinginkan didalam suatu instansi penganggaran dapat dilihat dari fungsi utamanya, yaitu:

a. Sebagai alat perencanaan

Anggaran dapat dijadikan alat perencanaan manajemen untuk mencapai tujuan organisasi sehingga organisasi akan tahu apa yang harus dilakukan dan ke arah mana kebijakan akan dibuat. Anggaran sebagai alat perencanaan digunakan untuk :

- 1) Merumuskan tujuan serta sasaran kebijakan agar sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan.
- 2) Merencanakan berbagai program dan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi serta alternative pembiyaannya.
- 3) Mengalokasikan dana pada berbagai program dan kegiatan yang telah disusun.
- 4) Menentukan indikator kinerja dan tingkat pencapaian strategi.

b. Alat pengendalian

Anggaran sebagai alat pengendalian digunakan untuk menghindari adanya pengeluaran yang terlalu besar, terlalu rendah, terlalu rendah, salah sasaran, atau adanya penggunaan yang tidak sesuai. Pengendalian anggaran instansi pemerintah dapat dilakukan dengan 4 cara yaitu:

- 1) Membandingkan kinerja actual dengan kinerja yang dianggarkan.
- 2) Menghitung selisih anggaran

3) Menemukan penyebab yang dapat dikendalikan dan tidak dapat dikendalikan suatu varians.

4) Merevisi standar biaya atau target anggaran untuk tahun berikutnya.

c. Alat kebijakan fiskal

Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal pemerintah, dapat digunakan untuk menstabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Melalui anggaran instansi pemerintah dapat diketahui arah kebijakan fiskal pemerintah, sehingga dapat dilakukan prediksi dan estimasi pemerintah.

d. Alat politik

Anggaran merupakan dokumen politik sebagai bentuk komitmen eksekutif dan legislatif atas penggunaan dana pemerintah untuk kepentingan tertentu. Anggaran tidak sekedar masalah teknik, akan tetapi diperlukan keterampilan berpolitik membangun koalisi, bernegosiasi, dan pemahaman tentang manajemen keuangan instansi pemerintah yang memadai oleh para manajer pemerintah.

e. Alat koordinasi dan komunikasi

Melalui dokumen anggaran yang komprehensif, bagian atau unit kerja atau departemen yang merupakan sub-organisasi dapat mengetahui apa yang harus dilakukan dan apa yang dilakukan oleh bagian unit kerja

lainnya. Maka dari itu, anggaran dapat digunakan sebagai alat koordinasi dan komunikasi antara dan seluruh bagian dalam pemerintahan.

f. Alat evaluasi kerja

Kinerja eksekutif dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran, efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran. Kinerja manajer pemerintah dinilai berdasarkan berapa hasil yang dicapai dan dikaitkan dengan anggaran yang telah ditetapkan. Anggaran merupakan alat yang efektif untuk pengendalian dan penilaian kinerja.

g. Alat untuk memotivasi

Anggaran dapat digunakan sebagai alat untuk memotivasi pegawai, anggaran hendaknya bersifat menantang, jangan terlalu tinggi sehingga dapat dipenuhi, namun jangan terlalu rendah juga sehingga mudah dicapai.

h. Alat untuk menciptakan ruang publik

Fungsi ini hanya berlaku pada organisasi instansi pemerintah, pada organisasi swasta anggaran merupakan dokumen yang rahasia yang tertutup oleh publik. Masyarakat dan elemen masyarakat lainnya non pemerintah harus terlibat langsung dalam penganggaran publik yang baik. Ini dapat bersifat langsung maupun tidak langsung.

### **2.1.2 Mekanisme Penyusunan APBD**

Proses penyusunan anggaran dimulai dengan menetapkan tujuan, target, dan kebijakan, di mana keselarasan pemahaman antara berbagai pihak mengenai apa yang ingin dicapai dan bagaimana tujuan tersebut terkait dengan program-program yang akan dijalankan menjadi faktor kunci dalam kesuksesan penganggaran. Pada tahap ini, juga dimulai proses distribusi sumber daya. Mencapai kesepakatan tentang alokasi sumber daya menjadi tahap awal dalam pelaksanaan anggaran. Proses yang panjang dari penetapan tujuan hingga pelaksanaan anggaran seringkali melewati tahap yang melelahkan, sehingga seringkali tahap penilaian dan evaluasi diabaikan. Hal ini adalah kondisi yang terjadi dalam praktiknya (Indra, 2006).

Penganggaran dapat didefinisikan sebagai perencanaan yang dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, termasuk dalam hal keuangan dan ukuran kuantitatif lainnya (Supriyono, 2002). Pada saat penganggaran dilakukan, laba yang ingin dicapai oleh perusahaan ditetapkan. Oleh karena itu, penganggaran juga dapat disebut sebagai perencanaan laba atau profit planning. Setelah kegiatan yang dianggarkan dijalankan, hasilnya akan dibandingkan dengan anggaran yang telah disusun, sehingga dapat diidentifikasi penyimpangan yang muncul. Penyimpangan tersebut akan dianalisis lebih lanjut dan digunakan sebagai umpan balik untuk perencanaan kegiatan di masa yang akan datang.

Dengan kata lain, anggaran adalah rencana rinci yang secara formal menggambarkan bagaimana sumber daya akan diperoleh dan digunakan dalam periode tertentu, biasanya dalam jangka waktu satu tahun. Anggaran merupakan rencana kerja yang dinyatakan secara kuantitatif, dengan pengukuran dalam satuan moneter standar dan satuan ukuran lainnya, yang mencakup periode satu tahun. Anggaran adalah rencana kerja jangka pendek yang disusun berdasarkan rencana kegiatan jangka panjang yang telah ditetapkan dalam proses penyusunan program (Bangun, 2009).

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 menyatakan bahwa dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pendekatan kinerja digunakan. Pendekatan anggaran berbasis kinerja adalah sistem yang menekankan pencapaian hasil kerja atau output sebagai fokus utama alokasi biaya atau input yang telah ditentukan. Anggaran berbasis kinerja yang efektif lebih dari sekadar menitikberatkan pada program atau organisasi yang diaudit, tetapi juga mencakup hasil yang telah diharapkan (Indra, 2006).

### **2.1.3 Teori Pelaporan**

Pelaporan kinerja oleh lembaga pemerintah direkam dalam dokumen yang dikenal sebagai Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Pemerintah memiliki kewajiban untuk menyediakan informasi keuangan dan informasi lainnya yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan dalam ranah ekonomi, sosial, dan politik oleh para pemangku



kepentingan. Akuntansi dan pelaporan keuangan adalah suatu proses yang melibatkan pengumpulan, pengelolaan, dan penyampaian informasi yang memiliki nilai dalam pengambilan keputusan dan dalam mengevaluasi kinerja suatu organisasi (Jumirin, 2001).

Fatmala (2014) menekankan bahwa lembaga pemerintah harus mampu menghasilkan laporan keuangan eksternal yang mencakup berbagai jenis laporan formal, seperti laporan surplus/defisit, laporan realisasi anggaran, laporan laba rugi, laporan arus kas, serta indikator kinerja yang diukur dengan metode finansial maupun non-finansial. Instansi pemerintah yang berkewajiban menerapkan sistem akuntabilitas kinerja dan melaporkannya adalah lembaga dari tingkat Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Tanggung jawab utama dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) terletak pada pejabat yang memiliki peran fungsional dalam hal administrasi di masing-masing instansi. Selanjutnya, pemimpin instansi bersama dengan tim kerjanya bertanggung jawab dalam menjelaskan dan mempertanggungjawabkan tingkat kinerja yang telah dicapai (Herwaty, 2011).

Pelaporan keuangan oleh instansi pemerintah merupakan salah satu elemen kunci dalam upaya untuk mencapai akuntabilitas instansi pemerintah. Dalam konteks ini, terdapat tekanan yang signifikan untuk mendorong akuntabilitas dalam manajemen pemerintah, dengan salah satu alatnya adalah

informasi akuntansi dalam bentuk laporan keuangan. Tantangan yang dihadapi oleh akuntansi dalam instansi pemerintah adalah apakah mampu menyediakan informasi yang dapat digunakan untuk memantau akuntabilitas dalam manajemen, politik, dan kebijakan, seperti yang dijelaskan oleh Lagenderfer (1973) sebagaimana disebutkan dalam Glyn J. J. (1993). Dalam pandangan normatif, akuntansi memiliki tiga aspek utama, yaitu:

- 1) Sifat informasi yang diberikan.
- 2) Kepada siapa informasi tersebut diberikan.
- 3) Apa tujuan informasi itu diberikan.

Jenis laporan keuangan instansi pemerintah yang minimal dan terintergrasi sebagai berikut ini :

- a) Laporan posisi keuangan.
- b) Laporan kinerja keuangan.
- c) Laporan perubahan Aktivitas/Ekuitas Netto.
- d) Laporan arus kas.
- e) Kebijakan akuntansi dan catatan atau Laporan keuangan.

#### **2.1.4 Teori Pengendalian Akuntansi**

Menurut Rantiarno (2011), sistem pengendalian intern merujuk pada seperangkat kebijakan dan prosedur yang didesain untuk memberikan keyakinan yang wajar kepada manajemen bahwa organisasi telah mencapai

tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Kebijakan dan prosedur ini secara umum disebut sebagai pengendalian dan bersama-sama membentuk sistem pengendalian di dalam entitas tersebut. Menurut Horngren dkk (2006: 372), pengendalian intern adalah perencanaan organisasi dan serangkaian tindakan yang diimplementasikan oleh suatu entitas untuk menjaga keamanan aset, mendorong karyawan untuk mematuhi kebijakan perusahaan, meningkatkan efisiensi operasional, dan memastikan akurasi pencatatan akuntansi. Pengendalian intern merupakan proses yang digunakan oleh manajemen perusahaan untuk mencapai tujuan operasional dan administratif perusahaan. Ini melibatkan serangkaian tindakan yang meresap dan terintegrasi dalam seluruh proses pengendalian intern dan tidak harus ditambahkan secara terpisah dalam struktur perusahaan.

Pengendalian intern juga menciptakan situasi di mana sistem akuntansi yang memadai memungkinkan akuntan perusahaan untuk menyediakan informasi keuangan kepada berbagai tingkat manajemen, pemilik atau pemegang saham, kreditur, dan pemangku kepentingan lainnya (stakeholder) yang menjadi dasar untuk pengambilan keputusan ekonomi. Pengendalian internal melibatkan perencanaan, metode, prosedur, dan kebijakan yang dirancang oleh manajemen untuk memberikan keyakinan yang memadai terhadap pencapaian efisiensi dan efektivitas operasional,

keandalan pelaporan keuangan, perlindungan terhadap aset, kepatuhan terhadap undang-undang, kebijakan, dan peraturan lainnya.

Tujuan utama dari pengendalian internal adalah menciptakan suatu proses yang dipengaruhi oleh dewan komisaris, manajemen, dan personel lainnya di dalam sebuah entitas, yang bertujuan memberikan keyakinan yang memadai untuk mencapai tujuan organisasi tersebut.

- a) Mengecek ketelitian dan keandalan pelaporan keuangan

Manajemen hendaknya memiliki informasi yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan dalam melaksanakan kegiatannya dan pengambil keputusan.

- b) Menjaga kekayaan dan catatan organisasi

Harta kekayaan perusahaan merupakan sarana untuk keberhasilan perusahaan untuk itu perlu dilindungi dengan pengawasan yang memadai agar tidak tersesat atau hilang dari usaha penyalahgunaan dan usaha pencurian.

- c) Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan

Setiap pengendalian internal diharapkan dapat memberikan jaminan yang layak agar peraturan dan prosedur ditaati untuk mencapai tujuan perusahaan.

d) Efektivitas dan efisiensi operasi

Pengendalian dalam suatu perusahaan merupakan untuk mencegah pekerjaan yang tidak perlu, pemborosan dalam setiap usaha, dan menguji setiap penggunaan sumber daya yang tidak efisien. Tujuan pokok struktur pengendalian internal tersebut dapat dipenuhi dengan pengendalian yang baik. Tujuan pertama dan kedua dapat dipenuhi dengan pengendalian akuntansi, sedangkan tujuan ketiga dan keempat dapat dipenuhi dengan pengendalian administrasi yang baik.

Pengendalian akuntansi meliputi rencana organisasi serta prosedur dan catatan yang relevan dengan pengamanan aktiva, yang disusun untuk meyakinkan bahwa:

- a) Transaksi dilaksanakan sesuai dengan persetujuan pimpinan.
- b) Transaksi dicatat sehingga dibuat iktisarkeuangan sesuai prinsip akuntansi yang berlaku serta menekankan pertanggungjawaban atas harta perusahaan.
- c) Penguasaan atas aktiva diberikan hanya dengan persetujuan dan otorisasi pimpinan.
- d) Jumlah aktiva dalam catatan dicocokkan dengan aktiva yang ada pada waktu yang tepat dan tindakan yang sewajarnya jika terjadi perbedaan.

### 2.1.5 Teori Akuntabilitas

Dalam kutipan yang disampaikan oleh Starling, akuntabilitas dapat dijelaskan sebagai suatu ukuran yang menilai sejauh mana aktivitas birokrasi pemerintah atau layanan yang diberikan oleh pemerintah telah sesuai dengan norma dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat. Selain itu, akuntabilitas juga mencerminkan kemampuan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan sebenarnya dari masyarakat. Menurut UNDP, akuntabilitas merupakan proses evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan atau kinerja suatu organisasi, yang bertujuan untuk mempertanggungjawabkan hasil kerja tersebut dan memberikan umpan balik kepada pimpinan organisasi untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Akuntabilitas adalah sebuah konsep yang kompleks dan seringkali lebih sulit untuk diwujudkan daripada untuk mengatasi korupsi. Lebih lanjut, akuntabilitas menekankan perlunya lembaga-lembaga pemerintah untuk fokus pada pertanggungjawaban kepada masyarakat (aspek horizontal), bukan hanya pertanggungjawaban kepada otoritas yang lebih tinggi (aspek vertikal), seperti yang dijelaskan oleh Turner dan Hulme (1997).

Akuntabilitas merupakan bentuk dari pertanggungjawaban seseorang atau kelompok orang yang menerima amanat untuk melaksanakan tugas tertentu kepada pihak pemberi amanat baik secara vertikal maupun secara horizontal.



Ferlie (1997:202-216) mengemukakan bahwa ada beberapa model akuntabilitas adalah sebagai berikut:

- a) Akuntabilitas keatas (*Accountability Up*)
- b) Akuntabilitas kepada staf (*Accountability to staff*)
- c) Akuntabilitas kebawah (*Accountability downwards*)
- d) Akuntabilitas yang berbasis pasar (*Market base forms of accountability*)
- e) Akuntabilitas kepada diri sendiri (*Self Accountanbility*)

Dua model akuntabilitas yang pertama sebenarnya memiliki sedikit perbedaan dengan konsep kontrol, pengawasan, atau pengendalian dalam konteks birokrasi pemerintah. Sementara itu, konsep akuntabilitas downwards atau akuntabilitas ke bawah menekankan keterkaitan yang erat antara aktivitas politik dan pelayanan pemerintah dengan proses konsultatif dan kerjasama antara wakil rakyat dan masyarakat di tingkat lokal.

Adapun konsep Market-Based Forms of Accountability memberikan prioritas pada adanya kompetisi dan mekanisme pasar yang memungkinkan masyarakat memiliki banyak pilihan terkait dengan kualitas pelayanan yang mereka inginkan. Dalam konteks ini, pemerintah perlu memiliki pemahaman yang luas untuk menyediakan layanan publik yang memadai serta memastikan ketersediaan informasi atau penetapan standar yang dapat menjamin akuntabilitas yang baik dalam penyediaan layanan publik.

Konsep terakhir yang dikenal sebagai self-accountability sebenarnya merujuk pada proses pertanggungjawaban internal yang sangat bergantung pada pemahaman dan penerapan nilai-nilai moral serta etika oleh para pejabat birokrat yang menjalankan tugas dalam pelayanan pemerintah.

## **2.2 Variabel Penelitian**

Variabel independen dalam penelitian Pengaruh Sasaran Penganggaran, Pengendalian Akuntansi, dan Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi pada **DINAS YANG MENANGANI KETAHANAN PANGAN KABUPATEN/KOTA DAN DI PROVINSI JAWA TENGAH** adalah Sasaran Penganggaran, Pengendalian Akuntansi, dan Pelaporan, sedangkan variabel dependennya yaitu Akuntabilitas Kinerja Instansi.

### **2.2.1 Sasaran Penganggaran**

Suharono dan Solichin (2006) menjelaskan bahwa kejelasan sasaran anggaran merujuk pada sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan secara tegas dan spesifik agar orang yang bertanggung jawab atas pencapaian sasaran anggaran tersebut dapat memahaminya.

Dalam konteks karakteristik suatu anggaran, kejelasan sasaran anggaran menjadi aspek penting. Kehadiran sasaran anggaran yang jelas akan memudahkan individu untuk merencanakan target anggaran mereka. Hal ini akan memastikan bahwa target yang diatur akan sejalan dengan tujuan anggaran yang ingin dicapai oleh instansi pemerintah.

Sasongko (2010) mendefinisikan anggaran sebagai rencana kegiatan yang dinyatakan dalam bentuk kuantitatif atau dalam bentuk angka yang dilaksanakan oleh manajemen dalam periode tertentu.

Kenis dalam Andrias (2009) menjelaskan bahwa kejelasan sasaran anggaran penting untuk mengatur perilaku pegawai. Para pelaksana anggaran akan merasa bingung dan tidak puas dalam bekerja jika sasaran penganggaran tidak jelas. Dengan adanya sasaran anggaran yang jelas, akan lebih mudah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas dalam suatu instansi, yang pada akhirnya akan berkontribusi pada tercapainya akuntabilitas kinerja.

### **2.2.2 Pengendalian Akutansi**

Dalam konteks pengendalian (control), diasumsikan bahwa telah ada rencana, tindakan, atau standar yang telah ditetapkan untuk mengukur kinerja pelaksanaan. Tujuannya adalah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan bagi perusahaan, dan pengendalian ini harus dikembangkan agar memungkinkan pengambilan keputusan yang sesuai dengan rencana tersebut. Penggunaan struktur akuntansi memungkinkan pengendalian biaya dan perbandingan biaya dengan rencana tindakan yang telah ditetapkan sebelumnya. Melalui pengukuran kinerja, dengan bantuan catatan dan laporan akuntansi serta statistik, manajemen dapat memberikan panduan yang sesuai dan mengarahkan kegiatan perusahaan.

Pengendalian akuntansi dalam perusahaan diharapkan untuk memberikan keyakinan yang memadai, meskipun bukan keyakinan mutlak, kepada dewan direksi dan manajemen perusahaan mengenai informasi pelaksanaan kegiatan operasional dan administrasi yang berhubungan dengan pencapaian tujuan perusahaan. Hal ini terkait dengan keterbatasan yang ada dalam sistem pengendalian internal perusahaan dan perlunya pertimbangan tentang biaya dan manfaat relatif dari setiap pengendalian yang dilakukan (Jawadi, 2016).

Menurut Blocher dan lainnya (2007:126), pengendalian akuntansi bertujuan untuk mencegah, mendeteksi, dan mengambil tindakan terhadap kecurangan yang mungkin terjadi dalam instansi pemerintah. Dengan pengendalian akuntansi, pencatatan transaksi keuangan diharapkan sesuai dengan standar yang berlaku, akurat, dan dapat meminimalkan kesalahan pencatatan. Pengendalian akuntansi juga didasarkan pada asumsi bahwa telah ada rencana tindakan atau standar untuk mengukur kinerja pelaksanaan kegiatan, dan hal ini diperlukan untuk mencapai tujuan perusahaan (Mulyadi: 2008).

### **2.2.3 Pelaporan**

Secara asal-usul, kata "sistem" berasal dari bahasa Yunani, yaitu "Sytema," yang mengacu pada suatu kesatuan, yang merupakan kumpulan elemen-elemen yang berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu sebagai satu kesatuan (Mulyanto: 2009:1).

Menurut Halim (2007:326), laporan keuangan adalah informasi keuangan yang disusun oleh suatu entitas untuk kepentingan pihak internal dan eksternal dari entitas tersebut. Pelaporan keuangan mencakup semua aspek yang terkait dengan penyediaan dan penyampaian informasi keuangan.

Pelaporan kinerja adalah kewajiban untuk mempresentasikan dan melaporkan hasil kinerja dari semua aktivitas dan sumber daya yang harus dipertanggungjawabkan. Ini merupakan bagian dari proses akuntabilitas kinerja.

Setiap instansi pemerintah diwajibkan untuk menyiapkan, menyusun, dan melaporkan laporan keuangan secara tertulis, berkala, dan terstruktur. Laporan keuangan instansi pemerintah memberikan gambaran tentang posisi keuangan yang melibatkan transaksi yang telah dilakukan oleh instansi pemerintah.

Pelaporan kinerja bertujuan untuk mengkomunikasikan hasil kinerja instansi pemerintah selama satu tahun anggaran dan bagaimana hal tersebut berkaitan dengan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh instansi pemerintah. Laporan kinerja oleh instansi pemerintah ini dicatat dalam dokumen yang disebut Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Tujuan umum dari penyampaian laporan keuangan oleh instansi pemerintah adalah sebagai berikut:

1. Memberikan informasi yang dapat digunakan dalam proses pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik.
2. Menyediakan bukti pertanggungjawaban (accountability) atas penggunaan dana dan aset publik serta tugas pengelolaan (stewardship).
3. Menyediakan informasi yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasional.

(Mardiasmo: 2002:162).

#### **2.2.4 Akuntabilitas Kinerja Instansi**

Akuntabilitas kinerja dalam instansi pemerintah adalah implementasi dari kewajiban untuk bertanggung jawab atas hasil atau kegagalan dalam menjalankan misi organisasi dan mencapai tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan melalui proses pertanggungjawaban secara berkala.

Menurut Simbolon (2006:1), akuntabilitas merupakan tanggung jawab untuk memberikan pertanggungjawaban atau untuk memberikan penjelasan mengenai kinerja dan tindakan individu, badan hukum, kepemimpinan kolektif, atau organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta informasi atau pertanggungjawaban. Secara umum, akuntabilitas publik terdiri dari dua jenis, yaitu:

1. Akuntabilitas Vertikal



Akuntabilitas Vertikal adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana terhadap otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit-unit kerja (dinas) kepada pemerintah daerah, pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, dan pemerintah pusat kepada MPR.

## 2. Akuntabilitas Horizontal

Akuntabilitas dan pertanggungjawaban horizontal adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas.

Akuntabilitas Kinerja Pemerintah merupakan dasar yang sangat penting dalam proses penyelenggaraan pemerintahan yang efektif. Oleh karena itu, pegawai pemerintah harus memberikan pertanggungjawaban atas semua kegiatan dan tindakan mereka kepada masyarakat. Dalam konteks pemerintahan, akuntabilitas publik melibatkan penyediaan informasi tentang aktivitas dan kinerja pemerintah kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan dalam hal tersebut. Fokus utama dari akuntabilitas publik adalah memberikan informasi kepada masyarakat dan pihak-pihak lain yang memiliki kepentingan dalam hal ini. Selain itu, akuntabilitas publik juga melibatkan kewajiban untuk menjelaskan dan merespons pertanyaan-pertanyaan mengenai apa yang telah dilakukan, sedang dilakukan, dan yang direncanakan oleh organisasi sektor publik.

Mewujudkan akuntabilitas adalah tujuan utama dari reformasi sektor publik. Prinsip-prinsip akuntabilitas publik menekankan bahwa lembaga-lembaga sektor publik harus lebih fokus pada pertanggungjawaban horizontal daripada pertanggungjawaban vertikal. Prinsip ini juga mendorong pentingnya pelaporan keuangan eksternal yang dapat memberikan gambaran mengenai kinerja lembaga-lembaga di dalam instansi pemerintah. Meskipun konsep akuntabilitas tidaklah baru di Indonesia, hampir seluruh instansi dan lembaga pemerintah telah lama mengedepankan konsep akuntabilitas, terutama dalam menjalankan fungsi administrasi pemerintahan.

### 2.3 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini dikemukakan sebagai berikut:

**Tabel 2.1**

**Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti	Judul	Variabel	Hasil
1.	Laksana (2014)	<i>Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengawasan Fungsional, dan Pelaporan Kinerja terhadap Akuntabilitas Publik Di Kab. Batang</i>	<i>X1: Kejelasan Anggaran X2: Sasaran Anggaran X3 : Pengawasan Fungsional X4 : Pelaporan Kinerja</i>	Dengan adanya kejelasan anggaran dan sasaran anggaran yang baik maka akan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja yang menjadikan perusahaan dapat berkembang dengan baik

			<i>Y: Akuntabilitas Kerja</i>	
2.	Kusumaningrum (2020)	<i>Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi JawaTengah</i>	<i>X1: Kejelasan Sasaran Anggaran</i>  <i>X2: Pengendalian Akutansi</i> <i>X3 : Sistem Pelaporan</i>  <i>Y: Akuntabilitas Kinerja Instansi</i>	Adanya praktek Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akutansi dan Sistem Pelaporan akan mampu berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi
3.	Kaltsum (2013)	<i>Pengaruh Kejelasan Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah melalui Sistem Pengendalian Intern sebagai Variabel Intervening (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Salatiga</i>	<i>X1: Kejelasan Sasaran Anggaran</i>  <i>Y1: Pengendalian Interen</i>  <i>Y2: Akuntabilitas Kinerja Instansi</i>	Dalam keberlangsungan laporan keuangan dibutuhkan kejelasan anggaran yang baik, akuntabilitas kinerja instansi yang mampu menjadikan pengendalian interen yang berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi
4.	Isnanto (2019)	<i>Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah</i>	<i>X1: Kejelasan Sasaran Anggaran</i>  <i>X2: Pengendalian Akutansi</i> <i>X3 : Sistem Pelaporan</i>  <i>Y: Akuntabilitas Kinerja Instansi</i>	Adanya praktek Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akutansi dan Sistem Pelaporan akan mampu berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi yang mampu mengoptimalkan keuangan
5.	Herawaty (2021)	<i>Pengaruh Kejelasan Anggaran, Pengendalian Akuntansi</i>	<i>X1: Kejelasan Sasaran Anggaran</i>	Adanya praktek Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akutansi dan Sistem

		<i>dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kota Jambi</i>	<i>X2: Pengendalian Akutansi X3 : Sistem Pelaporan  Y: Akuntabilitas Kinerja Instansi</i>	Pelaporan akan mampu berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi yang mampu mengoptimalkan keuangan sehingga berpengaruh positif dan signifikan secara parsial
6.	Haspriati (2022)	<i>Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Pada Pemerintah Kota Parepare)</i>	<i>X1: Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja  Y: Akuntabilitas Kinerja Instansi</i>	Dalam membentuk penerapan anggaran yang berbasis kinerja diperlukan akuntabilitas yang jelas untuk membangun kapasitas publik dalam membentuk keuangan yang baik
7.	Hidayat (2017)	<i>Pengaruh Kompetensi Aparatur Pemerintah, Ketaatan pada Peraturan Perundangan dan Kejelasan Sasaran terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan Komitmen Organisasi dan Kinerja Manajerial Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris pada SKPD Kabupaten Kampar)</i>	<i>X1: Kejelasan Sasaran Anggaran  X2: Pengendalian Akutansi X3 : Sistem Pelaporan X4 : Peraturan perundangan  Y: Akuntabilitas Kinerja Instansi</i>	Adanya praktek Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akutansi dan Sistem Pelaporan akan mampu berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi yang mampu mengoptimalkan keuangan
8.	Efrizar (2017)	<i>Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Akuntabilitas Publik, Dan Sistem Pelaporan Terhadap Kinerja Manajerial</i>	<i>X1: Kejelasan Sasaran Anggaran  X2: Pengendalian Akutansi</i>	Adanya kejelasan sasaran anggaran , akuntabilitas publik dan sistem pelaporan mampu membentuk Akuntabilitas Kinerja

		<i>(Studi Empiris Pada SKPD Kabupaten Rokan Hulu).</i>	<i>X3 : Sistem Pelaporan</i>  <i>Y: Akuntabilitas Kinerja Instansi</i>	Instansi yang mampu mengoptimalkan keuangan yang mampu meningkatkan keuangan perusahaan
9.	Cahyani (2019)	<i>Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan pada Akuntabilitas</i>	<i>X1: Kejelasan Sasaran Anggaran</i>  <i>X2: Pengendalian Akuntansi</i>  <i>X3: Sistem Pelaporan</i>  <i>Y: Akuntabilitas</i>	Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan akan mampu berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi yang mampu mengoptimalkan keuangan sehingga berpengaruh positif dan signifikan secara parsial
10.	Arifin (2012)	<i>Pengaruh Partisipasi Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah dengan Komitmen Organisasi sebagai Variabel Moderasi</i>	<i>X1: Partisipasi Anggaran</i>  <i>X2: Pengendalian Akuntansi</i>  <i>X3: Sistem Pelaporan</i>  <i>Y: Akuntabilitas</i>	Adanya Partisipasi anggaran akan mampu mengoptimalkan akuntabilitas yang ada dalam perusahaan dan akan berpengaruh secara signifikan hal ini dikarenakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi yang mampu mengoptimalkan keuangan di dalam lembaga instansi yang dimiliki oleh pemerintah

*Sumber : Data artikel yang diolah penulis, 2023*



## 2.4 Pengembangan Hipotesis

### 1. Pengaruh Sasaran Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi

Menurut Suharono dan Solichin (2006), kejelasan sasaran anggaran merujuk pada tingkat ketegasan tujuan anggaran yang dinyatakan secara terperinci, sehingga dapat dipahami oleh pihak yang bertanggung jawab atas pencapaian sasaran anggaran di dalam Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah. Anggaran juga merupakan pernyataan mengenai proyeksi kinerja yang diharapkan dicapai selama periode waktu tertentu dan diukur dalam ukuran finansial. Anggaran sektor publik perlu disampaikan kepada masyarakat, didistribusikan, dan menerima masukan dari mereka. Anggaran dalam sektor publik terkait dengan proses penentuan alokasi dana untuk setiap program dengan aktivitas yang diukur dalam satuan moneter. Penelitian yang dilakukan oleh Hilmi (2004) dan Mei Arjayanti (2012) menunjukkan bahwa kejelasan sasaran penganggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi.

Hipotesis pertama adalah:

**H1: Sasaran Penganggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi**

### 2. Pengendalian Akuntansi terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi

Menurut blocher, dkk (2007:126) mengemukakan bahwa kegiatan dalam pemrosesan data keuangan dengan tujuan mencegah atau mendeteksi dan



tindakan kecurangan yang ada di dalam instansi. Kejelasan sasaran anggaran berimplikasi pada pimpinan, untuk menyusun anggaran sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai instansi pemerintah. Pimpinan akan memiliki informasi yang cukup untuk memprediksi masa depan secara tepat. Sasaran anggaran yang jelas akan memudahkan SKPD untuk menyusun target anggaran. Selanjutnya target-target anggaran yang disusun akan sesuai dengan sasaran yang akan dicapai pemerintah daerah. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Indraswari (2010) menyatakan bahwa pengendalian akuntansi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi.

Hipotesis kedua adalah:

**H2: Pengendalian akuntansi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi**

### 3. Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi

Halim (2007:326) menjelaskan bahwa laporan keuangan adalah informasi keuangan yang disusun oleh suatu entitas untuk kepentingan pihak internal maupun eksternal dari entitas dalam suatu instansi. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan sebuah alat untuk memastikan akuntabilitas lembaga yang dimulai dengan penetapan visi, misi, tujuan, dan sasaran organisasi yang tercantum dalam rencana strategis lembaga. Kemudian, hal tersebut diimplementasikan dalam perencanaan kerja tahunan

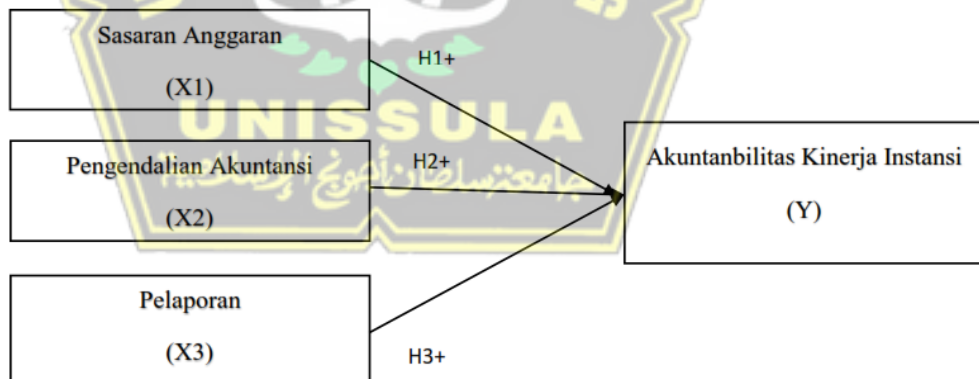
untuk mencapai tujuan dan kinerja yang telah ditetapkan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Anthony (2005) mengindikasikan bahwa pelaporan memiliki dampak positif terhadap tingkat akuntabilitas kinerja instansi.

Hipotesis ketiga adalah:

**H3: Pelaporan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi**

### 2.3 Model Penelitian

Akuntabilitas kinerja instansi dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk sasaran penganggaran, pengendalian akuntansi, dan pelaporan. Landasan teoritis yang menggambarkan faktor-faktor yang memengaruhi akuntabilitas kinerja instansi dapat disajikan sebagai berikut:



**Gambar 2.2**  
**Model grafis**



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kausal komparatif dengan pendekatan kualitatif untuk mengumpulkan data terkait variabel yang sedang diteliti guna menjawab pertanyaan penelitian. Pendekatan kualitatif adalah jenis penelitian yang fokus pada pemahaman masalah yang melibatkan hubungan sebab-akibat antara dua variabel atau lebih, dengan beberapa karakteristik, seperti pendekatan yang bersifat alamiah, penjelasan yang bersifat deskriptif, penekanan pada proses dan makna, serta analisis data yang bersifat induktif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, dan pelaporan terhadap Dinas yang berurusan dengan Ketahanan Pangan di tingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi Jawa Tengah (Sugiyono, 2013).

#### **3.2 Populasi Dan Sampel**

Populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh kinerja instansi yang terdapat dalam Dinas yang bertanggung jawab atas Ketahanan Pangan di Kabupaten/Kota dan Provinsi Jawa Tengah. Untuk mendapatkan data, penelitian ini mengambil sampel dari 35 kabupaten.

Penentuan jumlah sampel responden menggunakan rumus Slovin, yang sesuai digunakan ketika populasi sebenarnya telah diketahui jumlahnya. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah metode simple random sampling, di

mana sampel diambil secara acak dari seluruh populasi (Jogiyanto, 2013). Berikut adalah rumus Slovin yang digunakan:

$$n = \frac{N}{1 + (N \times e^2)}$$

n = Jumlah Sempel

N = Jumlah Poulasi

e = Persen kesalahan yang diinginkan (5%)

### 3.3 Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data kuantitatif, yang didefinisikan sebagai data berbentuk angka atau data kualitatif yang telah diubah menjadi bentuk nilai numerik (skoring) (Sugiyono, 2010:23).

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer diperoleh melalui pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner, yang merupakan kumpulan pertanyaan yang telah dirumuskan untuk mencatat tanggapan dari responden (Sekaran, 2003). Dalam penelitian ini, responden akan memberikan tanggapan terhadap pertanyaan yang berkaitan dengan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, pelaporan, dan akuntabilitas kinerja instansi.

### 3.4 Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini mengumpulkan data primer, yang merujuk pada data yang diperoleh langsung dari Kantor Dinas Ketahanan Pangan di Provinsi Jawa Tengah serta data yang diperoleh langsung dari responden melalui penggunaan kuesioner. Responden diharapkan menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner yang diberikan oleh peneliti. Kuesioner ini diisi secara langsung oleh responden sesuai dengan panduan yang telah diberikan.

Data primer dikumpulkan dengan menggunakan metode survei yang melibatkan penggunaan kuesioner. Sejumlah pertanyaan disusun oleh peneliti, dan responden diminta untuk memberikan tanggapan mereka sesuai dengan panduan yang diberikan. Untuk mengukur tanggapan responden, digunakan skala Likert, yang biasanya terdiri dari lima angka penilaian (Indrianto dan Supomo, 2013:104), yang mencakup:

- 1 = Tidak Setuju (TS)
- 2 = Setuju (S)
- 3 = Netral (N)
- 4 = Sangat Setuju (SS)

Jawaban Responden Skor Tidak Setuju (TS) 1 , Setuju (S) 2, Netral (N) 3, Sangat Setuju (SS) 4.



### 3.5 Definisi Operasional dan Indikator Variabel

Tabel 3.2 Variabel dan Indikator

No	Variabel	Definisi Operasional	Indikator	Skala Pengukuran
1.	Sasaran Anggaran	Sasaran Anggaran adalah rencana kegiatan yang dijalankan oleh manajemen dalam periode yang terutang secara kuantatif (Sasongko, 2020).	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sasaran Anggaran satuan kerja yang terdapat dalam APBD harus diuraikan secara spesifik.</li> <li>2. Sasaran anggaran satuan kerja yang terdapat dalam APBD.</li> <li>3. Sasaran anggaran dapat mengetahui tingkat kepentingan pada setiap program.</li> <li>4. Sasaran anggaran dapat mengetahui jelas <i>outcame</i> yang harus dicapai setiap kegiatan dan program.</li> <li>5. Sasaran anggaran satuan kerja pada APBD penyelesaian kegiatan yang sesuai dengan anggaran yang di prioritaskan.</li> </ol>	Skala Likert 1-4

2.	Pengendalian Akuntansi	<p>Pengendalian akuntansi mengasumsikan bahwa telah ditetapkan suatu rencana tindakan atau standar untuk mengukur prestasi pelaksanaan kegiatan. Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan, pengendalian harus dikembangkan sehingga dapat diambil keputusan yang sesuai dengan rencana (Mulyadi:2018).</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Audit atau pemeriksaan intern sebagai dasar alat pengambilan keputusan.</li> <li>2. Evaluasi yang sistematis dan terjadwal sebagai dasar alat pengambilan keputusan.</li> <li>3. Penetapan target anggaran sebagai dasar alat pengambilan keputusan.</li> <li>4. Rencana jangka panjang dan jangka pendek sebagai dasar alat pengambilan keputusan.</li> </ol>	Skala Likert 1-4
3.	Pelaporan	<p>Pelaporan kinerja merupakan refleksi kewajiban untuk mempresentasikan dan melaporkan kinerja semua aktivitas serta sumber daya yang harus dipertanggungjawabkan. Pelaporan ini merupakan wujud dari proses akuntabilitas (Indra Bastian,2019:297).</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hasil pembuatan laporan penerimaan dan pengeluaran kas.</li> <li>2. Pelaksanaan anggaran harus sesuai dengan prosedur dan pertanggungjawaban yang telah ditetapkan.</li> <li>3. Kejelasan dan pencatatan penggunaan anggaran harus terperinci.</li> </ol>	Skala Likert 1-4

4.	Akuntanbi litas Kinerja Instansi	Akuntabilitas adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang atau badan hukum atau pimpinan kolektif atau organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berwenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban ( Simbolon, 2019:1).	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keterkaitan yang erat antara pencapaian kinerja dengan program dan kebijakan.</li> <li>2. Melakukan analisis keuangan setiap kegiatan atau program yang telah selesai dilaksanakan.</li> <li>3. Pengecekan terhadap jalannya program.</li> <li>4. Pimpinan dan pegawai bertanggungjawab (accountable) hasil dari suatu program/ kegiatan yang telah dilaksanakan.</li> <li>5. Pimpinan dan pegawai selalu terlibat bersama-sama dalam mengevaluasi hasil suatu program/ kegiatan.</li> </ol>	Skala Likert 1-4
----	---	---	--	---------------------

*Sumber: Data Primer yang diolah tahun 2021*

### 3.6 Teknik Analisis

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis path atau analisis jalur yang digunakan untuk menganalisis hubungan sebab-akibat beberapa variabel independen terhadap variabel dependen.

### **3.6.1 Analisis Statistik Deskriptif**

Analisis deskriptif adalah metode statistik yang digunakan untuk menguraikan atau menjelaskan data yang telah dikumpulkan tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku umum (Sugiyono, 2009). Statistik deskriptif digunakan untuk mengidentifikasi nilai maksimum, minimum, rata-rata, dan deviasi standar dari setiap variabel yang diamati.

### **3.6.2 Uji Kualitas Data Diri**

#### **1. Uji Reabilitas**

Uji reliabilitas adalah alat untuk menilai sejauh mana kuesioner, yang merupakan indikator dari variabel (Ghozali, 2011), dapat diandalkan. Suatu kuesioner dianggap reliabel atau dapat dipercaya jika jawaban yang diberikan oleh seseorang terhadap pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner tersebut konsisten dari waktu ke waktu (Ghozali, 2006). Jika jawaban terhadap indikator-indikator tersebut bervariasi secara acak, maka dapat dianggap bahwa kuesioner tersebut tidak reliabel.

Pengukuran reliabilitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan Cronbach Alpha. Jika nilai Cronbach Alpha dari variabel penelitian lebih dari 0,60, maka dapat dianggap bahwa instrumen yang digunakan dalam penelitian ini reliabel dan dapat dipercaya. Namun, jika nilai Alpha kurang dari 60%, hal ini mengindikasikan bahwa beberapa responden memberikan jawaban yang tidak konsisten, dan dalam hal ini,

jawaban dari responden yang tidak konsisten harus dikeluarkan dari analisis, yang kemudian akan meningkatkan nilai alpha (Devaluisa, 2009).

## **2. Uji Validitas**

Menurut Ghozali (2006), uji validitas digunakan untuk menilai apakah suatu kuesioner sah atau valid. Kuesioner dianggap valid jika pertanyaan-pertanyaan di dalamnya mampu mengukur konsep atau variabel yang hendak diukur oleh kuesioner tersebut. Validitas bertujuan untuk menentukan sejauh mana pertanyaan dalam kuesioner dapat menggambarkan atau mengukur apa yang sebenarnya hendak diukur.

Dalam penelitian ini, validitas diuji menggunakan metode Pearson Correlation. Ini berarti bahwa untuk menentukan validitas, peneliti menghitung korelasi bivariat antara skor dari masing-masing indikator pertanyaan dengan total skor konstruk. Validitas dianggap terpenuhi jika korelasi antara skor setiap pertanyaan dengan total skor memiliki tingkat signifikansi kurang dari 0,05. Selain itu, uji validitas juga menggunakan Cronbach Alpha dengan persyaratan nilai di atas 0,60.

## **3. Uji Asumsi Klasik**

Uji asumsi klasik digunakan sebagai prasyarat dalam melakukan analisis menggunakan regresi.

### 1) Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menentukan apakah data variabel terikat dan variabel bebas dalam penelitian ini mengikuti distribusi normal atau tidak. Kualitas data yang baik adalah data yang memiliki distribusi normal atau mendekati distribusi normal (Ghozali, 2011). Dalam penelitian ini, digunakan metode One Sample Kolmogorov-Smirnov Test untuk menguji normalitas data.

Prosedur uji ini adalah dengan membandingkan hasil uji signifikansi (p-value) dengan taraf signifikansi yang telah ditentukan, yaitu jika nilai p dari uji Kolmogorov-Smirnov lebih besar dari 0,05, maka data dianggap berdistribusi normal. Sebaliknya, jika nilai p kurang dari 0,05, maka data dianggap tidak berdistribusi normal.

### 2) Uji Multikolinearitas

Tujuan dari uji multikolinearitas adalah untuk menentukan apakah terdapat korelasi antara variabel bebas (variabel independen) dalam analisis regresi. Salah satu metode untuk mendeteksi apakah multikolinearitas ada atau tidak adalah dengan menggunakan Variance Inflation Factor (VIF). Dalam literatur, disebutkan bahwa



multikolinearitas dapat diabaikan jika nilai  $R^2$  tinggi dan setidaknya salah satu dari koefisien regresi adalah signifikan (Gujarati, 2009).

### 3) Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menentukan apakah ada ketidaksetaraan dalam variasi residual antar pengamatan dalam model regresi. Ketika variasi residual antar pengamatan tetap atau seragam, kita menyebutnya homoskedastisitas, sedangkan jika variasinya tidak seragam, kita sebut sebagai heteroskedastisitas. Sebuah model regresi yang baik akan menunjukkan homoskedastisitas atau ketiadaan heteroskedastisitas. Heteroskedastisitas sering muncul dalam data cross-section karena data ini menggabungkan berbagai ukuran, baik kecil, sedang, maupun besar (Ghozali, 2011). Uji heteroskedastisitas ini menggunakan uji Glejser, yang melibatkan analisis pola sebaran data dalam scatterplot. Jika data tersebar dengan merata, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat heteroskedastisitas.

## 3.7 Pengujian Hipotesis

Menggunakan analisis regresi berganda, *path analysis* (analisis jalur), koefisien determinasi (adjusted  $R^2$ ), uji F, dan uji t.

### 3.7.1 Analisis Regresi Linier Berganda

Model pertama sebagai variabel dependennya adalah Akuntabilitas Kinerja Instansi persamaan regresi linier berganda yang dipergunakan untuk menganalisis variabel tersebut adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Keterangan:

Y	=	Akuntabilitas Kinerja Instansi
a	=	Koefisien Konstanta
b <sub>1,2,3</sub>	=	Koefisien arah regresi
X <sub>1</sub>	=	Sasaran Anggaran
X <sub>2</sub>	=	Pengendalian Akuntansi
X <sub>3</sub>	=	Pelaporan
e	=	Error tern model (variabel residual)

### 3.7.2 Uji t

Pengujian ini dilakukan menguji signifikansi setiap variabel independen terkait variabel dependen. Uji t dapat dihitung menggunakan rumus=

$$t = \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}$$

Keterangan :

t = t hitung

$r$  = koefisien korelasi

$n$  = jumlah sampel

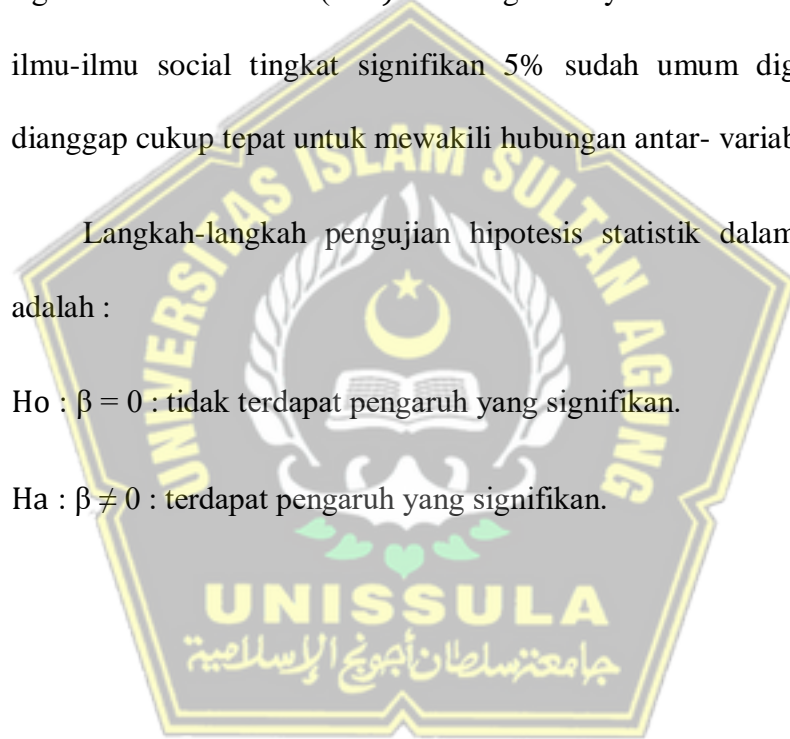
(Sugiyono, 2014:250)

Pengujian hipotesis akan dilakukan dengan menggunakan tingkat signifikan sebesar 5% ( $\alpha=0$ ) atau tingkat keyakinan sebesar 95%. Dalam ilmu-ilmu social tingkat signifikan 5% sudah umum digunakan karena dianggap cukup tepat untuk mewakili hubungan antar- variabel yang diteliti.

Langkah-langkah pengujian hipotesis statistik dalam penelitian ini adalah :

$H_0 : \beta = 0$  : tidak terdapat pengaruh yang signifikan.

$H_a : \beta \neq 0$  : terdapat pengaruh yang signifikan.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Hasil Penelitian

Berdasarkan data yang telah dikumpulkan selama penelitian berjumlah sebanyak 107 populasi, yang mana selanjutnya dianalisis yang telah dilakukan, kami akan menjelaskan hasilnya menggunakan analisis deskriptif dengan bantuan perangkat lunak SPSS 18. Analisis deskriptif ini digunakan untuk memberikan gambaran rinci mengenai objek penelitian, termasuk karakteristik responden. Tujuannya adalah untuk memberikan dukungan dan penjelasan yang lebih mendalam terkait dengan pembahasan.

Selain itu, kami juga menggunakan analisis regresi untuk mengidentifikasi hubungan antara berbagai variabel yang telah diteliti dan untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan dalam bab sebelumnya.

#### 4.2 Karakteristik Responden

##### 4.2.1 Jenis Kelamin

**TABEL 4.1**  
**JENIS KELAMIN**

		Jenis_Kelamin			
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Laki-Laki	52	52,0	49,0	52,0
	Perempuan	55	55,0	58,0	100,0
	Total	107	107,0	100,0	

*Sumber : Data Primer yang diolah, 2023*

Berdasarkan tabel 4.1 di atas, dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden adalah wanita, mencapai 55% dari total responden. Sementara itu, jumlah responden pria lebih sedikit, sekitar 52%. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar karyawan yang bekerja di Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Tengah adalah wanita. Hal ini mungkin disebabkan oleh fakta bahwa pekerjaan di bidang administratif dan pelayanan cenderung lebih banyak diisi oleh wanita karena pekerjaan tersebut memerlukan tingkat ketelitian dan kesabaran yang tinggi.

Di sisi lain, jumlah responden pria yang hampir seimbang dengan jumlah wanita mungkin disebabkan oleh kebutuhan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Tengah terhadap tenaga pria dalam pekerjaan tertentu, seperti pekerjaan lapangan dan inventaris. Pria dianggap lebih mampu untuk tugas-tugas ini karena memiliki daya tahan fisik yang lebih tinggi dan energi yang kuat.

#### 4.2.2 Masa Kerja

**TABEL 4.2**  
**USIA KARYAWAN**

		Usia_Karyawan			
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	30 Tahun – 45 Tahun	15	22,0	22,0	22,0
	46 Tahun – 61 Tahun	92	85,0	85,0	100,0
Total		107	107,0	100,0	

*Sumber : Data Primer yang diolah, 2023*

Tabel 4.2 menyajikan informasi tentang masa kerja karyawan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Tengah berdasarkan rentang usia. Data dalam tabel menunjukkan bahwa mayoritas responden adalah karyawan dengan usia antara 46 hingga 61 tahun, yang mencapai persentase tertinggi sebesar 85%. Sebaliknya, jumlah karyawan yang termasuk dalam rentang usia 30 hingga 45 tahun memiliki persentase yang lebih rendah, yaitu sekitar 22%.

Data ini mengindikasikan bahwa mayoritas karyawan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Tengah berada dalam rentang usia dan masa kerja yang masih produktif. Mereka dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Tengah sebagai sumber daya manusia yang masih aktif dan produktif dalam pekerjaan mereka.



### 4.2.3 Tingkat Pendidikan

**TABEL 4.3**  
**TINGKAT PENDIDIKAN**

		Tingkat Pendidikan			
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sarjana	72	77,0	77,0	77,0
	SMA	1	1,07	1,07	1,07
	Diploma	6	6,42	6,42	6,42
	Pascasarjana	28	29,96	29,96	100,0
	Total	107	107,0	100,0	

*Sumber : Data Primer yang diolah, 2023*

Berdasarkan Tabel 4.3, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden dalam penelitian memiliki tingkat pendidikan Sarjana S1, dengan jumlah karyawan sebanyak 72 orang, yang merupakan sekitar 77% dari total responden. Diikuti oleh responden dengan tingkat pendidikan Pascasarjana/S2, yang berjumlah 28 karyawan atau sekitar 29.96%. Adanya satu responden dengan tingkat pendidikan SMA, yang hanya memiliki persentase sekitar 1.07%.

Data ini menggambarkan bahwa mayoritas karyawan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Tengah memiliki latar belakang

pendidikan Sarjana S1. Hal ini mungkin disebabkan oleh persyaratan lowongan CPNS di Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Tengah yang mengharuskan minimal lulusan D3/S1 untuk posisi operasional kantor. Selain itu, terdapat karyawan yang memiliki pendidikan SMA, yang kemungkinan merupakan karyawan honorer yang kemudian diangkat menjadi karyawan tetap tanpa melanjutkan pendidikan formalnya.

#### 4.3 Analisis Kualitatif

Berdasarkan hasil tanggapan dari 107 orang responden tentang pengaruh Sasaran Anggaran, Pengendalian Akutansi, dan Pelaporan untuk meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi, maka peneliti akan menguraikan secara rinci jawaban responden yang dikelompokkan dengan kategori rendah, sedang dan tinggi sebagai berikut, menurut (Umar, 2012):

$$RS = \frac{TT-TR}{Kelas}$$

5 = skala likert tertinggi yang digunakan dalam penelitian

1 = skala likert terendah yang digunakan dalam penelitian

$$RS = \frac{5-1}{5}$$

$$5$$

$$RS = 0,8$$

Berikut ini akan dijelaskan rentang skala untuk kategori sangat rendah, rendah, sedang, tinggi dan sangat tinggi.

No	Interval	Kategori
1	Interval 1 – 1,80	Sangat Rendah
2	Interval 1,81 – 2,60	Rendah
3	Interval 2,61 – 3,40	Sedang
4	Interval 3,41 – 4,20	Tinggi
5	Interval 4,21 – 5,00	Sangat Tinggi

#### 4.3.1 Analisis Deskriptif Variabel Sasaran Penganggaran

Analisis deskriptif terhadap variabel penelitian, pertama kali dilakukan terhadap Sasaran Penganggaran (X1). Adapun analisis deskriptif yang dilakukan terhadap variabel Sasaran Penganggaran (X1) disajikan sesuai dengan kriteria sebagai berikut:

**TABEL 4.4**  
**DESKRIPTIF VARIABEL SASARAN PENGANGGARAN**

Indikator	Indeks										Rata-rata
	SS		S		R		TS		STS		
	F	FS	F	FS	F	FS	F	FS	F	FS	
Sasaran Anggaran satuan kerja yang terdapat dalam APBD harus diuraikan secara spesifik.	32	160	60	240	15	45	0	0	0	0	4,15
Sasaran anggaran satuan kerja yang terdapat dalam APBD.	32	160	66	264	9	27	0	0	0	0	4,21
Sasaran anggaran dapat mengetahui tingkat kepentingan pada setiap program.	32	160	68	272	7	21	0	0	0	0	4,32

Sasaran anggaran dapat mengetahui jelas <i>outcome</i> yang harus dicapai setiap kegiatan dan program.	28	140	60	240	17	51	2	4	0	0	4,23
Sasaran anggaran satuan kerja pada APBD penyelesaian kegiatan yang sesuai dengan anggaran yang di prioritaskan.	24	120	70	280	13	39	0	0	0	0	4,10
Nilai rata-rata											3,35

*Sumber : data primer yang diolah, 2023*

Berdasarkan Tabel 4.4, rata-rata jawaban responden adalah sebesar 3,35. Nilai ini menunjukkan bahwa respon responden dapat dianggap tinggi, yang mengindikasikan bahwa mereka menganggap Sasaran Penganggaran sangat penting bagi Karyawan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Tengah.

Dalam analisis indikator-indikator, ditemukan bahwa indikator dengan nilai rata-rata tertinggi adalah "Sasaran anggaran dapat mengetahui tingkat kepentingan pada setiap program," dengan nilai sebesar 4,32%. Hal ini menunjukkan bahwa Karyawan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Tengah memiliki pemahaman yang tinggi tentang pentingnya anggaran sebagai alat manajemen untuk perencanaan dan pengendalian jangka pendek dalam organisasi. Mereka juga menyadari bahwa anggaran adalah pernyataan estimasi kinerja yang hendak dicapai dalam periode waktu tertentu yang diukur dalam satuan finansial. Selain itu, anggaran sektor publik harus diinformasikan kepada publik, didistribusikan, dan diberi masukan.

Di sisi lain, indikator dengan nilai rata-rata terendah adalah "Sasaran anggaran satuan kerja pada APBD penyelesaian kegiatan yang sesuai dengan anggaran yang di prioritaskan," dengan nilai sebesar 4,10%. Hal ini menunjukkan bahwa Karyawan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Tengah mungkin kurang memahami pentingnya menyusun anggaran sesuai dengan sasaran yang diinginkan oleh instansi pemerintah. Oleh karena itu, perlu peningkatan pemahaman terkait pengelolaan anggaran untuk memastikan kejelasan sasaran anggaran dan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dalam rangka mencapai akuntabilitas kinerja yang baik.

#### 4.3.2 Analisis Deskriptif Pengendalian Akutansi

Analisis deskriptif terhadap variabel penelitian, keempat kali dilakukan terhadap Pengendalian Akutansi (X2). Adapun analisis deskriptif yang dilakukan terhadap variabel Pengendalian Akutansi (X2) disajikan sesuai dengan kriteria sebagai berikut:

**TABEL 4.5**  
**DESKRIPTIF VARIABEL PENGENDALIAN AKUTANSI**

Indikator	Indeks										Rata-rata
	SS		S		R		TS		STS		
	F	FS	F	FS	F	FS	F	FS	F	FS	
Audit atau pemeriksaan intern sebagai dasar alat pengambilan keputusan.	24	120	70	280	13	39	0	0	0	0	4,10
Evaluasi yang sistematis dan terjadwal sebagai dasar alat pengembalian keputusan.	48	240	50	200	9	27	0	0	0	0	4,36

Penetapan target anggaran sebagai dasar alat pengambil keputusan.	18	90	76	304	13	39	0	0	0	0	4,04
Rencana jangka panjang dan jangka pendek sebagai dasar alat pengambil keputusan.	32	160	60	240	15	45	0	0	0	0	4,15
Nilai rata-rata											4,16

Sumber : data primer yang diolah, 2023

Berdasarkan Tabel 4.5, rata-rata jawaban responden adalah sebesar 4,16. Nilai ini mengindikasikan bahwa respon responden tergolong tinggi, yang menunjukkan bahwa Pengendalian Akuntansi dianggap sangat penting oleh Karyawan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Tengah.

Dalam analisis indikator-indikator, ditemukan bahwa indikator dengan nilai rata-rata tertinggi adalah "Evaluasi yang sistematis dan terjadwal sebagai dasar alat pengambilan keputusan," dengan nilai sebesar 4,36%. Hal ini menunjukkan bahwa Karyawan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Tengah menganggap bahwa Sistem Akuntansi Manajemen yang mereka terapkan dilakukan dengan baik untuk menghindari kesenjangan antara pelaporan yang diminta dan nilai yang dihasilkan oleh perusahaan. Selain itu, langkah-langkah pertama dalam siklus perencanaan akuntansi, seperti produksi proposal, membantu mereka menyusun cara optimal dalam memanfaatkan sumber daya perusahaan, sehingga mencapai efektivitas dan efisiensi dalam kapasitas kerja.



Di sisi lain, indikator dengan nilai rata-rata terendah adalah "Penetapan target anggaran sebagai dasar alat pengambilan keputusan," dengan presentase sebesar 4,04%. Hal ini menunjukkan bahwa Karyawan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Tengah mungkin belum sepenuhnya memahami pentingnya penetapan target anggaran sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, perlu meningkatkan pemahaman terkait peran penting target anggaran dalam pengendalian akuntansi dan proses pengambilan keputusan yang efektif.

#### 4.3.3 Analisis Deskriptif Variabel Pelaporan

Analisis deskriptif terhadap variabel penelitian, ketiga kali dilakukan terhadap Pelaporan (X3). Adapun analisis deskriptif yang dilakukan terhadap variabel Pelaporan (X3) disajikan sesuai dengan kriteria sebagai berikut :

**TABEL 4.6**  
**DESKRIPTIF VARIABEL PELAPORAN**

Indikator	Indeks										Rata-rata
	SS		S		R		TS		STS		
	F	FS	F	FS	F	FS	F	FS	F	FS	
Hasil pembuatan laporan penerimaan dan pengeluaran kas.	32	160	60	240	15	45	0	0	0	0	4,15
Pelaksanaan anggaran harus sesuai dengan prosedur dan pertanggungjawaban yang telah ditetapkan.	32	160	66	264	9	27	0	0	0	0	4,21

Kejelasan dan pencatatan penggunaan anggaran harus terperinci.	24	96	70	280	13	39	0	0	0	0	3,87
Nilai rata-rata											4,07

Sumber : data primer yang diolah, 2023

Berdasarkan Tabel 4.6, rata-rata jawaban responden adalah sebesar 4,07. Nilai ini mengindikasikan bahwa respon responden tergolong tinggi, yang menunjukkan bahwa Pelaporan dianggap sangat penting oleh Karyawan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Tengah.

Dalam analisis indikator-indikator, ditemukan bahwa indikator dengan nilai rata-rata tertinggi adalah "Pelaksanaan anggaran harus sesuai dengan prosedur dan pertanggungjawaban yang telah ditetapkan," dengan nilai sebesar 4,21%. Hal ini menunjukkan bahwa Karyawan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Tengah memiliki pandangan positif terhadap laporan keuangan yang mereka terima, dan menganggapnya sebagai laporan yang jujur, objektif, dan transparan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN). Selain itu, laporan keuangan juga digunakan sebagai umpan balik (feedback) dalam mengukur kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja dalam pelaksanaan rencana anggaran.

Di sisi lain, indikator dengan nilai rata-rata terendah adalah "Kejelasan dan pencatatan penggunaan anggaran harus terperinci," dengan presentase sebesar 3,87%. Hal ini mungkin menunjukkan bahwa Karyawan Dinas

Ketahanan Pangan Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Tengah perlu memperhatikan lebih lanjut kejelasan dan pencatatan penggunaan anggaran agar lebih terperinci. Pemikiran strategis dalam setiap organisasi sangat penting, terutama dalam menghadapi lingkungan yang berubah-ubah. Pengelolaan keuangan pemerintah yang berakuntabilitas sangat tergantung pada anggaran pemerintah yang tepat guna dalam mengelola sumber daya dan mencapai kinerja yang baik, serta menciptakan akuntabilitas terhadap masyarakat.

#### 4.3.4 Analisis Deskriptif Variabel Akuntabilitas Kinerja Instansi

Analisis deskriptif terhadap variabel penelitian, kedua kali dilakukan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi (Y). Adapun analisis deskriptif yang dilakukan terhadap variabel Akuntabilitas Kinerja Instansi (Y) disajikan sesuai dengan kriteria sebagai berikut :

**TABEL 4.7**  
**DESKRIPTIF VARIABEL AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI**

Indikator	Indeks										Rata-rata
	SS		S		R		TS		STS		
	F	FS	F	FS	F	FS	F	FS	F	FS	
Keterkaitan yang erat antara pencapaian kinerja dengan program dan kebijakan.	24	96	70	280	13	39	0	0	0	0	3,94
Melakukan analisis keuangan setiap kegiatan atau program yang telah selesai dilaksanakan.	24	120	70	280	13	39	0	0	0	0	4,18

Pengecekan terhadap jalannya program.	48	240	50	200	9	27	0	0	0	0	4,48
Pimpinan dan pegawai bertanggungjawab (accountable) hasil dari suatu program/ kegiatan yang telah dilaksanakan.	18	90	76	304	13	39	0	0	0	0	4,12
Pimpinan dan pegawai selalu terlibat bersama-sama dalam mengevaluasi hasil suatu program/ kegiatan.	32	160	60	240	15	45	0	0	0	0	4,24
Nilai rata-rata											4,19

Sumber : data primer yang diolah, 2023

Berdasarkan Tabel 4.5, ditemukan bahwa rata-rata jawaban responden adalah sebesar 4,19, yang menunjukkan bahwa responden memberikan respon tinggi terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi. Hal ini mengindikasikan bahwa Karyawan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Tengah sangat menganggap penting adanya akuntabilitas kinerja dalam organisasi mereka.

Salah satu indikator dengan nilai rata-rata tertinggi adalah "Pengecekan terhadap jalannya program," dengan nilai sebesar 4,48%. Hal ini menunjukkan bahwa Karyawan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Tengah melakukan pengecekan yang optimal terhadap kinerja pemerintah. Setiap akhir periode, instansi pemerintah melakukan pengukuran pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja. Pengukuran ini melibatkan perbandingan antara target

kinerja dan realisasi kinerja menggunakan data-data seperti dokumen penetapan kinerja, realisasi capaian output/outcome, pagu anggaran, dan realisasi anggaran. Hasil pengukuran kinerja ini selanjutnya dilaporkan dalam laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Di sisi lain, indikator dengan nilai rata-rata terendah adalah "Keterkaitan yang erat antara pencapaian kinerja dengan program dan kebijakan," dengan presentase sebesar 3,94%. Ini menunjukkan bahwa Karyawan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Tengah mungkin perlu memperhatikan lebih lanjut hubungan antara pencapaian kinerja dengan program dan kebijakan. Proses pelaksanaan pemeriksaan kinerja melibatkan beberapa tahapan, termasuk perencanaan pemeriksaan, pelaksanaan pemeriksaan, dan pelaporan pemeriksaan. Tahap perencanaan pemeriksaan melibatkan identifikasi masalah, penentuan area kunci, penentuan objek dan lingkup pemeriksaan, serta menetapkan kriteria pemeriksaan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pelaksanaan kinerja sesuai dengan tujuannya, ekonomis, efisien, dan efektif. Selain itu, tahap perencanaan juga membantu menentukan sumber daya yang dibutuhkan untuk pemeriksaan kinerja.

## 4.4 Analisis Kuantitatif

### 4.4.1 Hasil Uji Validitas

Dalam penelitian ini uji validitas diukur dengan menghitung korelasi antara skor masing – masing butir pertanyaan dengan total skor yang diperoleh.

**TABEL 4.8**  
**HASIL UJI VALIDITAS**

Variabel	No. Item	R hitung	R table 5%	Sign	Keterangan
Sasaran Penganggaran (X1)	X1.1	0,665	0.2732	0,000	Valid
	X1.2	0,654		0,000	Valid
	X1.3	0,621		0,000	Valid
	X1.4	0,561		0,000	Valid
	X1.5	0,625		0,000	Valid
Pengendalian Akutansi (X2)	X2.1	0,647	0.2732	0,000	Valid
	X2.2	0,685		0,000	Valid
	X2.3	0,776		0,000	Valid
	X2.4	0,767		0,000	Valid
Pelaporan (X3)	X3.1	0,537	0.2732	0,000	Valid
	X3.2	0,696		0,000	Valid
	X3.3	0,661		0,000	Valid



Akuntabilitas Kinerja Instansi (Y1)	Y1.1	0,640	0.2732	0,000	Valid
	Y1.2	0,527		0,000	Valid
	Y1.3	0,691		0,000	Valid
	Y1.4	0,564		0,000	Valid
	Y1.5	0,697			

Sumber : Data primer yang diolah, tahun 2023

Dari hasil uji validitas variabel Sasaran Penganggaran, Pengendalian Akutansi, Pelaporan dan Akuntabilitas Kinerja Instansi dapat dikatakan bahwa keseluruhan pernyataan yang diajukan oleh peneliti terhadap responden valid karena nilai  $r$  hitung  $>$   $r$  tabel.

#### 4.4.2 Hasil Uji Reliabilitas

**TABEL 4.9**  
**HASIL UJI RELIABILITAS**

Variabel	Alpha Cronbach	Angka Standar Reliabel	Kriteria
Sasaran Penganggaran (X1)	0,725	0,60	Reliabel
Pengendalian Akutansi (X2)	0,728	0,60	Reliabel
Pelaporan (X3)	0,607	0,60	Reliabel
Akuntabilitas Kinerja Instansi (Y1)	0,764	0,60	Reliabel

Sumber : Data primer yang diolah, tahun 2023

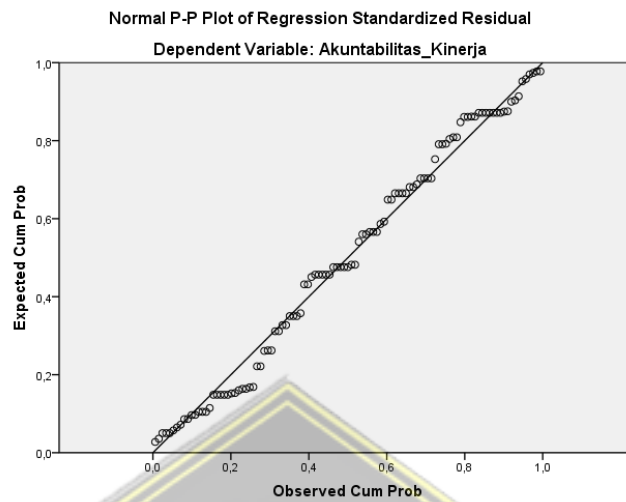
Berdasarkan tabel koefisien 4.9 semua variabel tersebut dikatakan reliabel sehingga layak diuji ke tahap selanjutnya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semua variabel Sasaran Penganggaran, Pengendalian Akutansi, Pelaporan dan Akuntabilitas Kinerja Instansi telah memenuhi

persyaratan, artinya bahwa variabel memiliki nilai alpha diatas 0,60 sehingga keseluruhan variabel adalah reliabel.

#### 4.4.3 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah variabel bebas dan variabel terikat dalam penelitian ini keduanya berdistribusi normal, mendekati normal, atau tidak. Uji normalitas dalam penelitian menggunakan uji normal *probability plot*. Jika data menyebar disekitar garis dan mengikuti arah garis diagonal maka model regresi memenuhi asumsi normalitas (Ghozali,2006).

**Gambar 4.1**  
**Pengujian Normalitas dengan Grafik Scatterplot**



Berdasarkan gambar diatas hasil pengujian normalitas menunjukan bahwa data menyebar disekitar garis dan mengikuti arah garis diagonal sehingga dapat disimpulkan model regresi tersebut sudah memenuhi asumsi normalitas.

#### 4.4.4 Uji Kolmogorov Smirnov

Dasar pengambilan keputusan melalui analisis grafik ini, jika data menyebar di sekitar garis diagonal sebagai representasi pola distribusi normal, berarti model regresi memenuhi asumsi normalitas. Sementara dasar pengambilan keputusan Uji Kolmogorov Smirnov yaitu data yang normal ditunjukkan dengan nilai signifikansi di atas 0,05.

**TABEL 4.10**  
**HASIL UJI KOLMOGOROV- SMIRNOV**

**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		107
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,82577885
Most Extreme Differences	Absolute	,097
	Positive	,097
	Negative	-,070
Kolmogorov-Smirnov Z		,999
Asymp. Sig. (2-tailed)		,871

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Dari tabel uji Kolmogorov-Smirnov Test menunjukkan angka nilai signifikansi 0,871 berarti telah melebihi diatas nilai signifikansi yaitu 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi secara normal.

**4.4.5 Uji Multikolonieritas**

Uji multikolonieritas bertujuan menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas jika variabel bebas berkorelasi maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel bebas yang nilai korelasi antara sesama variabel bebas = 0. Multikolonieritas dapat dilihat dari nilai tolerance dan variance inflation factor (VIF). Hasil pengujian multikolonieritas dapat dilihat sebagai berikut :

**TABEL 4.11  
HASIL UJI MULTIKOLONERITAS**

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
Sasaran Penganggaran (X1)	0,906	1,416
Pengendalian Akutansi (X2)	0,995	1,439
Pelaporan (X3)	0,968	1,033

Sumber : Data Primer yang diolah, 2023

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa hasil pengujian *tolerance* menunjukkan tidak ada variabel bebas yang memiliki nilai *tolerance* kurang dari 0,10 (10%). Hasil perhitungan VIF kurang dari 10. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model regresi tersebut tidak terdapat problem multikolinieritas. Maka model regresi yang ada layak untuk dipakai.

#### 4.4.6 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual suatu pengamatan yang lain (Ghozali, 2005). Cara mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas ialah dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat (dependen) yaitu ZPERD dengan residualnya SRESID. Kriteria yang digunakan adalah jika terjadi pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. Sebaliknya jika tidak terdapat pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas. Hasil heteroskedastisitas dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 4.1

### Pengujian Heteroskedastisitas dengan Grafik Scatterplot



Berdasarkan hasil pengamatan Gambar 4.2 diatas dapat terlihat grafik tidak membentuk pola khusus, yaitu titik yang menyebar sehingga dapat dikatakan baha model tidak terdapat problem heteroskedastisitas.

#### **4.4.7 Pengujian Regresi Linier Berganda**

Perhitungan statistik dalam analisis regresi linier berganda yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan bantuan program komputer spss for windows versi 16.0. Persamaan regresi berganda digunakan untuk menguji H1 sampai H3 yaitu pengaruh variabel bebas (Sasaran Penganggaran, Pengendalian Akutansi dan Pelaporan) terhadap variabel terikat (Akuntabilitas Kinerja Instansi). Hasil analisis persamaan pertama dapat diringkas pada tabel berikut:

##### **A. Analisis Jalur Regresi Linear Berganda**

Pengujian hipotesis dilakukan dengan analisis jalur dengan menggunakan pendekatan OLS. Pengolahan data dengan program SPSS memberikan nilai kofisien persamaan jalur sebagai berikut:

**TABEL 4.12**  
**TABEL PERSAMAAN REGRESI LINEAR**

### Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,758 <sup>a</sup>	,711	,791	,83772

a. Predictors: (Constant), Pelaporan, Sasaran\_Anggaran, Pengendalian\_Akutansi

### Coefficients<sup>a</sup>

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	10,946	1,951		5,609	,000
	Sasaran_Anggaran	,231	,068	,329	3,384	,001
	Pengendalian_Akutansi	,271	,089	,297	3,030	,003
	Pelaporan	,353	,013	,439	3,472	,018

a. Dependent Variable: Akuntabilitas\_Kinerja

Model persamaan adalah sebagai berikut:

$$Y_1 = 0,329X_1 + 0,297X_2 + 0,439X_3$$

Dari model tersebut diatas menunjukkan bahwa koefisien regresi memiliki arah positif sebagaimana yang diharapkan.

- a. Koefisien Sasaran Anggaran memiliki arah positif terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi yang berarti bahwa Sasaran Anggaran yang lebih baik akan meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi. Dan selanjutnya hasil tersebut dapat diinterpretasikan untuk besarnya nilai dari masing masing koefisien regresinya.

- b. Koefisien Pengendalian Akutansi memiliki arah positif terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi yang berarti bahwa Pengendalian Akutansi yang lebih baik akan meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi. Dan selanjutnya hasil tersebut dapat diinterpretasikan untuk besarnya nilai dari masing masing koefisien regresinya.
- c. Koefisien Pelaporan memiliki arah positif terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi yang berarti bahwa Pelaporan yang lebih baik akan meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi. Dan selanjutnya hasil tersebut dapat diinterpretasikan untuk besarnya nilai dari masing masing koefisien regresinya.

#### **B. Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

Maksud dan tujuan koefisien determinasi adalah mengukur besarnya kemampuan model persamaan regresi (independen variable) dalam menerangkan variabel terikat. Pada tabel 4.12 ditunjukkan nilai  $R^2$  pada model regresi satu sebesar 0,791 yang artinya 79,1% variasi dari Akuntabilitas Kinerja Instansi dapat dijelaskan oleh variabel independen Sasaran Penganggaran, Pengendalian Akutansi dan Pelaporan , sedangkan sisanya 20,9 % Akuntabilitas Kinerja Instansi dapat dijelaskan oleh faktor-faktor lainnya.

## 4.5 Uji T

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui secara parsial (individual) variabel bebas berpengaruh secara signifikan maupun tidak signifikan terhadap variabel terikat. Kriteria dalam pengujian ini adalah sebagai berikut:

- a. Jika probabilitas  $> 0,05$  maka hipotesis nol ( $H_0$ ) diterima dan  $H_a$  ditolak. Yang artinya tidak ada pengaruh antara variabel bebas dengan variabel terikat.
- b. Jika probabilitas  $< 0,05$  maka hipotesis nol ( $H_0$ ) ditolak dan  $H_a$  diterima. Yang artinya ada pengaruh antara variabel bebas dengan variabel terikat.

Berdasarkan pengujian hipotesis yang telah dilakukan maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

### **1. Pengaruh Sasaran Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi**

Berdasarkan dari hasil penelitian yang diperoleh nilai dari koefisien Sasaran Anggaran sebesar 0,329 dengan nilai probabilitasnya 0,001 lebih kecil dari level signifikan yang digunakan sebesar 0,05 yang memiliki arti hipotesis nol ( $H_0$ ) Sasaran Anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi. Pengujian tersebut mampu menerima hipotesis pertama, sehingga dugaan yang menyatakan Sasaran Anggaran berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi diterima.

### **2. Pengaruh Pengendalian Akutansi terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi**

Berdasarkan dari hasil penelitian yang diperoleh nilai dari koefisien Pengendalian Akutansi sebesar 0,297 dengan nilai probabilitasnya 0,003 lebih kecil dari level signifikan yang digunakan sebesar 0,05 yang memiliki arti hipotesis nol ( $H_0$ ) Pengendalian Akutansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi. Pengujian tersebut mampu menerima hipotesis kedua, sehingga dugaan yang menyatakan Pengendalian Akutansi berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi diterima.

### **3. Pengaruh Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi**

Berdasarkan dari hasil penelitian yang diperoleh nilai dari koefisien Pelaporan sebesar 0,439 dengan nilai probabilitasnya 0,018 lebih kecil dari level signifikan yang digunakan sebesar 0,05 yang memiliki arti hipotesis nol ( $H_0$ ) Pelaporan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi. Pengujian tersebut mampu menerima hipotesis kedua, sehingga dugaan yang menyatakan Pelaporan berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi diterima.

## **4.6 Pembahasan**

### **1. Pengaruh Sasaran Penganggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi**

Hasil penelitian ini mengonfirmasi bahwa Sasaran Penganggaran memiliki efek positif dalam membangun Akuntabilitas Kinerja Instansi. Ini berarti jika karyawan merasakan bahwa Sasaran Penganggaran memiliki tingkat kepentingan yang tinggi, maka Akuntabilitas Kinerja Instansi juga akan meningkat. Temuan ini sesuai dengan persepsi responden terhadap indikator Sasaran anggaran dapat menentukan tingkat kepentingan pada setiap program, yang mencapai presentase sebesar 4,32%. Hal ini menggambarkan bahwa para karyawan di Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Tengah memahami secara jelas peran anggaran dalam perencanaan dan pengendalian jangka pendek di organisasi mereka. Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang ingin dicapai dalam periode waktu tertentu yang diukur dalam ukuran finansial. Pentingnya informasi anggaran dalam sektor publik adalah untuk memastikan alokasi dana yang tepat untuk setiap program dengan satuan moneter yang jelas. Oleh karena itu, perencanaan anggaran adalah komponen penting dalam pengendalian manajemen untuk mengevaluasi kinerja pegawai atau aparat negara. Penelitian sebelumnya oleh Hilmi (2004) dan Mei Arjayanti (2012) juga telah mengkonfirmasi bahwa Sasaran Penganggaran memiliki dampak positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi.

## **2. Pengaruh Pengendalian Akutansi terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi**



Hasil penelitian ini memverifikasi bahwa Pengendalian Akutansi memiliki efektivitas dalam membangun Akuntabilitas Kinerja Instansi. Artinya, semakin tinggi persepsi karyawan terhadap Pengendalian Akutansi, semakin tinggi tingkat Akuntabilitas Kinerja Instansi yang dihasilkan. Temuan ini sejalan dengan pandangan responden terhadap salah satu aspek Pengendalian Akutansi yang memiliki tingkat kepentingan tertinggi, yaitu Evaluasi yang sistematis dan terjadwal sebagai dasar alat pengambilan keputusan, dengan persentase mencapai 4,36%. Ini mencerminkan bahwa karyawan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Tengah memiliki Sistem Akuntansi Manajemen yang digunakan untuk menghindari perbedaan antara laporan yang diminta dengan nilai yang dihasilkan oleh perusahaan. Hal ini terutama tercermin dalam langkah awal siklus perencanaan akuntansi, yaitu proposal produksi, yang bertujuan membantu Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Tengah merancang cara optimal dalam memanfaatkan sumber daya perusahaan, sehingga mencapai efektivitas dan efisiensi dalam kapasitas kerja.

Pentingnya perencanaan keuangan diterapkan untuk menilai permintaan pelaporan yang diharapkan dapat dipenuhi oleh perusahaan. Hasil dari perencanaan keuangan ini merupakan elemen penting dalam menjaga kelangsungan Pengendalian Akutansi perusahaan. Pengendalian Akutansi memungkinkan pemerintah untuk menetapkan target-target anggaran yang



ingin dicapai oleh instansi pemerintah, sehingga mendorong pegawai atau aparat pemerintah untuk meningkatkan kinerja di dalam instansi pemerintah tersebut. Menurut Blocher, dkk (2007:126), Pengendalian Akutansi mencakup semua prosedur dan sistem formal yang digunakan untuk mencegah, mendeteksi, dan mengatasi tindakan kecurangan di dalam instansi. Penelitian sebelumnya oleh Indraswari (2010) juga telah mengkonfirmasi bahwa Pengendalian Akutansi memiliki dampak positif pada akuntabilitas kinerja instansi.

### **3. Pengaruh Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi**

Temuan dari penelitian ini mengonfirmasi bahwa Pelaporan memiliki efektivitas dalam membangun Akuntabilitas Kinerja Instansi. Dengan kata lain, semakin tinggi persepsi karyawan terhadap Pelaporan, semakin tinggi tingkat Akuntabilitas Kinerja Instansi yang dihasilkan. Temuan ini sejalan dengan pandangan responden tentang salah satu aspek Pelaporan yang memiliki tingkat kepentingan tertinggi, yaitu pelaksanaan anggaran harus sesuai dengan prosedur dan pertanggungjawaban yang telah ditetapkan, dengan persentase mencapai 4,21%. Hal ini mengindikasikan bahwa karyawan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Tengah memiliki Laporan Keuangan yang dianggap baik, yang harus mematuhi prinsip kejujuran, objektivitas, dan transparansi yang dijelaskan dalam Lembaga Administrasi Negara (LAN).

Laporan keuangan berfungsi sebagai umpan balik (feedback) yang digunakan untuk mengukur aktivitas yang dilakukan dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja saat melaksanakan rencana anggaran atau saat melaksanakan anggaran. Dengan demikian, pihak manajerial dapat menentukan hasil dari pelaksanaan rencana atau pencapaian tujuan anggaran yang telah ditetapkan. Suatu sistem pelaporan dianggap baik jika dalam pelaksanaan anggaran yang telah dibuat terdapat proses pemantauan dan pengendalian terhadap aktivitas manajerial selama pelaksanaannya.

Pemerintah memiliki kewajiban untuk menyediakan informasi terkait keuangan serta informasi lain yang digunakan oleh pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan di berbagai bidang, seperti ekonomi, sosial, dan politik. Laporan keuangan sangat mendukung perencanaan tindakan atau standar untuk mengukur kinerja pelaksanaan kegiatan. Pengendalian akuntansi mencakup beragam prosedur dan sistem formal yang memanfaatkan informasi untuk menjaga atau mengubah pola aktivitas dalam sebuah organisasi. Menurut Halim (2007:326), laporan keuangan adalah informasi keuangan yang disusun oleh suatu entitas untuk kepentingan pihak internal maupun eksternal dari entitas tersebut dalam sebuah instansi. Penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh Anthony (2005) juga menegaskan bahwa pelaporan berdampak positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Dari hasil analisis data yang telah diuraikan pada bab sebelumnya dari penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Sasaran Penganggaran mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi pada karyawan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Tengah. Hal ini berarti bahwa tingkat Sasaran Penganggaran yang tinggi memiliki pengaruh yang semakin besar terhadap Akuntabilitas pada karyawan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Tengah.
2. Pengendalian Akutansi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi pada karyawan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Tengah. Hal ini berarti bahwa tingkat Pengendalian Akutansi yang tinggi memiliki pengaruh yang semakin besar terhadap Akuntabilitas pada karyawan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Tengah.
3. Pelaporan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi pada karyawan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Tengah. Hal ini berarti bahwa tingkat Pelaporan yang tinggi memiliki pengaruh yang semakin besar terhadap Akuntabilitas pada karyawan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Tengah.

## 5.2 Saran

Dengan demikian implikasi hasil penelitian ini bagi menejerial dapat dikembangkan berdasarkan hasil tersebut, antara lain:

1. Dilihat dari nilai terendah beta pada variabel Pengendalian Akutansi sebesar 0,297 lebih kecil dari keempat variabel lain diharapkan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Tengah mampu mendukung adanya Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan sebuah instrumen akuntabilitas lembaga yang diawali dengan visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi yang tertuang dalam rencana strategis lembaga, lalu ditetapkan dalam rancangan kerja tahunan untuk mencapai sasaran dan tujuan yaitu menentukan dan mengukur kinerja, mengumpulkan data, pengklasifikasian, meringkas dan melaporkan kinerja untuk meningkatkan lembaga pada periode seterusnya.
2. Dilihat dari nilai koefisien beta tertinggi pada penelitian ini ada pada variabel Pelaporan sebesar 0,439 hal ini menandakan dari keempat variable yang ada variabel Pelaporan memiliki pengaruh yang paling besar sehingga saran untuk implikasi menejerial adalah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Tengah adalah diharapkan karyawan memiliki Sistem pelaporan dikatakan baik jika didalam pelaksanaan anggaran yang telah dibuat terdapat proses pemantauan dan pengendalian terhadap manajerial dalam pelaksanaannya. Pemerintah wajib menyediakan informasi terkait

keuangan maupun informasi lain yang digunakan oleh pemangku kepentingan untuk mengambil keputusan ekonomi, sosial dan politik.

3. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Tengah seharusnya melakukan pembaharuan sistem pengecekan yang optimal terhadap kinerja pemerintah sehingga Setiap akhir periode instansi pemerintah melakukan pengukuran pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dan realisasi kinerja. Data-data yang diperlukan dalam pengukuran kinerja adalah dokumen penetapan kinerja, realisasi capaian output/outcome, pagu anggaran, dan realisasi anggaran. Output yang dihasilkan dalam tahap pengukuran kinerja ini formulir pengukuran kinerja.

### **5.3 Keterbatasan Penelitian**

1. Menggunakan objek kurang luas, yaitu hanya sebatas Karyawan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Tengah saja yang terdiri dari sebanyak 107 responden. Variabel penelitian ini hanya sebatas empat variabel saja yaitu Sasaran Penganggaran, Pengendalian Akutansi, Pelaporan dan Akuntabilitas Kinerja Instansi sehingga kurang memenuhi kondisi sesungguhnya dilapangan.

### **5.4 Agenda Peneliti Mendatang**

1. Penelitian yang akan datang harus lebih banyak lagi variabel yang digunakan contohnya, *Good Corporate Governance*, *Green Financial Report*, *Financial*

*Technology*, dan *Financial Behaviour* sehingga mampu memperkuat suatu penelitian, permasalahan lebih lengkap dan kemungkinan berdampak pada penemuan sebuah konsep praktis yang baru serta mudah diterapkan sehingga dapat meningkatkan kinerja sumber daya manusia.

2. Jumlah responden yang digunakan lebih bervariasi dan lebih banyak lagi sehingga pendapat dari berbagai wilayah dapat tersampaikan. Serta memperluas populasi dan sampel yang digunakan agar diperbesar dari sampel sebelumnya, hal ini dilakukan supaya hasil penelitian lebih spesifik dan menarik untuk dikaji.



## **OUTPUT PENGOLAHAN DATA SPSS 15 VERSION**

### **UJI VALIDITAS**



## DAFTAR PUSTAKA

- Anthony, Robert N. 2005. *Management control system*. Jakarta: Salemba Empat
- Arifin, W. 2012. "Pengaruh Partisipasi Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah dengan Komitmen Organisasi sebagai Variabel Moderasi". *Jurnal Akuntansi & Investasi* Vol.13 No.1 Halaman 15-22
- Bangun, Andreas. 2009. *Pengaruh Partisipasi Dalam Penyusunan Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran dan Struktur Desentralisasi terhadap Kinerja Manajerial SKPD dengan Pengawasan Internal Sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten Deli Serdang)*. Tesis. Medan: Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatra Utara
- Bastian, Indra. 2006, *Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Daerah di Indonesia*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Blocher, dkk (2007:126), mengemukakan bahwa kegiatan dalam pemrosesan data keuangan dengan tujuan mencegah atau mendeteksi dan tindakan kecurangan yang ada di dalam instansi pemerintah.
- Cahyani dan Utami. 2015. "Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan pada Akuntabilitas Kinerja. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. ISSN: 2302-8556.
- Efrizar, R. 2017. "Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Akuntabilitas Publik, Dan Sistem Pelaporan Terhadap Kinerja Manajerial (Studi Empiris Pada SKPD Kabupaten Rokan Hulu)". *JOM Fekon*, Vol 4, No.1, ISSN: 2355-6854).
- Fatmala, Juanita. 2014. "Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, Pemahaman Akuntansi dan Ketaatan pada Peraturan Perundangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah". *Jurnal Universitas Bengkulu*.
- Hafiz, M. 2017. "Pengaruh Kompetensi Aparatur Pemerintah, Ketaatan pada Peraturan Perundangan dan Kejelasan Sasaran terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan Komitmen Organisasi dan Kinerja Manajerial Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris pada SKPD Kabupaten Kampar)". *JOM Fekom*. Vol 4 No.1. ISSN Online:2355-6854



- Harsanti, Pony. 2008. Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus. Penelitian. Kudus: Universitas Muria
- Haspiarti. 2012. “Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Pada Pemerintah Kota Parepare). Artikel Publikasi FEB Universitas Hasanudin.
- Herawaty, Netty. (2011). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, M. Ali
- Herawaty, Netty. 2021. “Pengaruh Kejelasan Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kota Jambi”. Jurnal Penelitian Universitas Jambi Seri Humaniora Volume 13 Nomor 2 Hal 31-36
- Hilmi (2004) dalam Mei Arjayanti (2012). Pengaruh Sasaran anggaran terhadap akuntabilitas Kinerja Instansi.
- Implementasi kebijakan otonomi daerah berdasarkan undang-undang nomor 32 tahun 2004 yang telah di rubah dengan undang- undang nomor 32 tahun 2014 maka terjadi perubahan Paradigma Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Yang bersifat Sentralistis menjadi Desentralistis yang memberikan wewenang kepada Pemerintah Daerah.
- Indra Bastian. 2006 Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar. Penerbit Erlangga. Jakarta
- INTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 1999 TENTANG AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH.
- Isnanto, Yogi., Suharmo, Bambang Widarmo. 2019. “Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah”. Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi Vol. 15 Edisi Khusus Oktober 2019:489-501.
- Jawadi, F. Basuki, H.P., and Efendy, L. 2016. “The Effect of Budget Goal Clarity, Organizational Commitment, Accounting Control, And adherence to Laws on The Perception of Government Performance of Central Lombok Regency. International Journal of The Indonesian Accounting Review, Vol.6 No.1, 21-36, e-ISSN:2302-822X
- Jumirin, A. 2001. “ Persepsi Kepala Instansi Pemerintah terhadap Otonomi Daerah dan Akuntabilitas Kinerja”. Tesis. Yogyakarta: Program Pasca Sarjana UGM

- Kaltsum, Ummu dan Abdul Rohman. 2013. “Pengaruh Kejelasan Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah melalui Sistem Pengendalian Intern sebagai Variabel Intervening (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Salatiga)”. *Diponegoro Journal Of Accounting* Vol 1 No 1 Hal 2-14
- Kumorotomo, Wahyudi. 2013. *Akuntabilitas Birokrasi Public*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Kusumaningrum, I. 2010. “Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah”. *Jurnal E- Universitas Diponegoro*.
- Laksana, A.P dan Handayani, B.D. 2014. “Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengawasan Fungsional, dan Pelaporan Kinerja terhadap Akuntabilitas Publik Di Kab. Batang”. *Accounting Analysis Journal*. ISSN:2252-6765.
- Langenderfer (1973) dalam Glynn, J.J. (1993). *Teori Pelaporan*.
- Laporan keuangan meliputi laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), neraca, laporan arus kas, dan catatan laporan keuangan yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan daerah (UU 17/2003 tentang Keuangan Negara).
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. ANDI: Yogyakarta
- Mulyanto (2009:1) sistem dapat diartikan sebagai berikut “sistem merupakan kumpulan dari elemen-elemen yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu sebagai satu kesatuan.
- PERATURAN DAERAH NO.9 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH.**
- Riantiarno, Reynaldi dan Azlina, Nur. 2011. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi pada SKPD Kabupaten Rokan Hulu). *Pekbis Jurnal* Vol.3, No.3, 560-568, ISSN Online: 2085-5214.
- Sri Pebrianti dan Nurma Aziza. 2018. “Effect of Clarity of Budget Objectives, Accounting Control, Reporting Systems, Compliance with Regulation on Performance Accountability of Government Agencies”. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, Volume 292

Sugiyono (2013:2), Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.

Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D. Bandung : Alfabeta Sekaran (2003). Data Primer.

Turner, Mark and Hulme, David, 1997. Governance, Administrasi, and Development: Making the State Work. London: MacMillan Press Ltd.

Undang- undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

UNDANG- UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2003 TENTANG KEUANGAN NEGARA.

UNDANG- UNDANG REPUBLIK INDONESIA, NOMOR 10 TAHUN 1950 TENTANG PEMBENTUKAN PROVINSI DI JAWA TENGAH

Zakiyudin, Suyanto : kejelasan Sasaran Anggaran... MAgister Akuntansi Universitas Pancasila 96 dan Sistem pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kota Jambi. Jurnal Peneliti Universitas Jambi Seri Humoniar. Jambi.

